

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba merupakan salah satu kebijakan dan strategi pemerintah Jakarta Timur dalam upaya memerangi bahaya narkoba. Upaya tersebut dilakukan melalui pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang biasa disingkat P4GN. Dalam melaksanakan P4GN, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2011 tentang pelaksanaan P4GN. Selain menerbitkan Inpres, pemerintah juga membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan P4GN.

Sebagai respons terhadap permasalahan narkotika, pada tahun 2020, Deputi Rehabilitasi BNN mengeluarkan kebijakan berupa program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM). Menurut BNN (2019), Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) adalah program yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam melakukan intervensi terhadap individu yang telah menggunakan narkoba. Intervensi ini berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat, sehingga keterbatasan akses terhadap rehabilitasi akibat faktor geografis, stigma, maupun biaya dapat diminimalisir.

Pada tahun 2019, BNN membentuk Pemulihan Berbasis Masyarakat (PBM) sebagai respons terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang membahas rehabilitasi narkotika. Dalam implementasinya, PBM memiliki

keterbatasan, di mana tugas utamanya hanya terbatas pada sosialisasi, pemetaan, dan penjangkauan. Pemulihan Berbasis Masyarakat (PBM) pada dasarnya tidak melaksanakan tindakan rehabilitasi terhadap pasien (Gunawan et al., 2023). PBM diharapkan mampu mengatasi berbagai hambatan, baik dalam hal akses maupun aksestabilitas, terhadap layanan rehabilitasi narkoba di Indonesia. Akses yang dimaksud mencakup ketersediaan dan kemudahan bagi penyalahguna narkoba untuk menjangkau pusat-pusat rehabilitasi yang tersebar di seluruh wilayah. Sementara itu, aksestabilitas berkaitan dengan tingkat penerimaan dan kesediaan masyarakat untuk mendukung program rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba (BNN Kota Payakumbuh, 2021).

Melalui pendekatan PBM, diharapkan cakupan layanan rehabilitasi dapat berkembang dengan cepat dan meluas hingga ke seluruh penjuru Indonesia. Pendekatan ini akan memungkinkan lebih banyak penyalahguna narkoba untuk mendapatkan akses yang mudah dan terjangkau terhadap program-program pemulihan dan rehabilitasi yang dibutuhkan. Selain itu, permasalahan stigma yang selama ini menimpa penyalahguna narkoba dapat diminimalisir. Dengan melibatkan masyarakat dan komunitas secara langsung dalam penanganan rehabilitasi narkoba, diharapkan dapat mengurangi pandangan negatif dan diskriminasi terhadap mereka. Masyarakat dan komunitas dapat berperan aktif dalam proses pemulihan, baik melalui dukungan sosial maupun keterlibatan dalam program-program pemberdayaan (BNN Kota Payakumbuh, 2021).

Program Pemulihan Berbasis Masyarakat (PBM) pada tahun 2021 mengalami perbaikan dan pembaruan menjadi Program Intervensi Berbasis

Masyarakat (IBM). Program ini memberikan kewenangan yang lebih kepada komunitas masyarakat, di mana tidak hanya melaksanakan sosialisasi, pemetaan, dan penjangkauan, tetapi juga diberikan tugas untuk melaksanakan proses rehabilitasi terhadap pasien dengan kategori pelayanan tingkat dasar (Badan Narkotika Nasional, 2019).

Tabel 1. 1 Perbandingan antara Program Pemulihan Berbasis Masyarakat (PBM) dan Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)

Aspek	Program Pemulihan Berbasis Masyarakat (PBM) (Badan Narkotika Nasional, 2019)	Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) (Badan Narkotika Nasional, 2021)
Definisi	Program rehabilitasi narkoba yang dilakukan di lingkungan masyarakat dengan dukungan keluarga dan komunitas	Program pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan di lingkungan masyarakat dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan
Tujuan	Memulihkan dan mereintegrasi penyalahguna narkoba ke dalam masyarakat	Mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat
Sasaran	Penyalahguna narkoba yang telah menjalani rehabilitasi di fasilitas kesehatan	Masyarakat umum, terutama kelompok rentan dan berisiko
Metode	Konseling, terapi, dukungan keluarga dan komunitas	Kampanye, edukasi, pelatihan, dan pengembangan komunitas
Hasil yang Diharapkan	Penyalahguna narkoba dapat pulih dan beradaptasi kembali dengan masyarakat	Terjadinya perubahan perilaku dan penurunan angka penyalahgunaan narkoba di masyarakat

Sumber: Diolah peneliti, 2024.

Program Pemulihan Berbasis Masyarakat (PBM) adalah pendekatan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan di lingkungan masyarakat, dengan melibatkan dukungan dari keluarga dan komunitas. Tujuan utamanya

adalah memulihkan dan mereintegrasi pengguna narkoba kembali ke dalam masyarakat setelah mereka menjalani proses rehabilitasi di fasilitas kesehatan. Melalui pendekatan ini, pengguna narkoba dapat memperoleh dukungan sosial, konseling, dan terapi yang diperlukan untuk membantu mereka beradaptasi dan kembali berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Di sisi lain, Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) berfokus pada upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat. Sasaran utamanya adalah masyarakat umum, terutama kelompok-kelompok yang rentan dan berisiko terhadap penyalahgunaan narkoba. Metode yang digunakan dalam IBM meliputi kampanye, edukasi, pelatihan, dan pengembangan komunitas. Tujuannya adalah untuk menciptakan perubahan perilaku di masyarakat dan menurunkan angka penyalahgunaan narkoba secara berkelanjutan.

Perbedaan utama antara kedua program ini terletak pada fokus dan sasaran. PBM berfokus pada pemulihan dan reintegrasi pengguna narkoba, sedangkan IBM berfokus pada pencegahan penyalahgunaan narkoba di masyarakat secara luas. Meskipun memiliki tujuan yang berbeda, kedua program ini dapat saling melengkapi dan memberikan kontribusi yang komprehensif dalam upaya mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Rehabilitasi melalui Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) merupakan program rehabilitasi penyalahguna narkoba yang dirancang oleh masyarakat, untuk masyarakat, dan oleh masyarakat melalui Agen Pemulihan (AP) dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat serta kearifan lokal.

Dalam praktiknya, Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) tidak hanya memberikan layanan rehabilitasi kepada pecandu narkoba dan korban

penyalahgunaan narkoba, tetapi juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat. IBM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba dan memperkuat wawasan di setiap keluarga mengenai peredaran narkoba, serta meningkatkan daya tangkal anak-anak remaja, khususnya kalangan pelajar, yang merupakan sasaran utama peredaran narkoba.

Melalui Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM), penanganan pecandu narkoba menjadi lebih dekat dan terjangkau bagi masyarakat. IBM berinteraksi langsung dengan pengguna narkoba, keluarga, dan komunitas sekitar, sehingga intervensi yang dilakukan menjadi semakin efektif. Pengguna narkoba dan keluarganya tidak perlu pergi ke tempat lain yang mungkin menjadi hambatan. Dengan pendekatan berbasis masyarakat ini, proses rehabilitasi dan pemulihan dapat dilakukan dengan lebih terjangkau dan terintegrasi dengan lingkungan tempat tinggal mereka.

Badan Narkotika Nasional (BNN), sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba, telah menetapkan regulasi yang mengatur tentang pengembangan komunitas dalam program intervensi berbasis masyarakat. Regulasi ini tertuang dalam dokumen resmi yang diterbitkan oleh BNN. Untuk mendukung implementasi IBM, BNN telah menyusun Pedoman Pelaksanaan Intervensi Berbasis Masyarakat. Dokumen ini memberikan panduan komprehensif bagi pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal dalam menjalankan program IBM secara terstruktur dan berkelanjutan.

Dalam pedoman ini, terdapat penjelasan rinci mengenai tahapan pelaksanaan IBM, mulai dari persiapan, implementasi, hingga evaluasi dan

pengembangan program. Selain itu, dibahas pula pentingnya peningkatan kapasitas masyarakat, pendampingan, dan upaya menjaga keberlanjutan intervensi di tingkat komunitas. Pada tahap pelaksanaan, IBM menekankan tiga komponen utama, yaitu pelatihan, pendampingan, dan pengembangan program. Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas anggota komunitas dalam memahami isu narkoba, melakukan identifikasi dini, serta memberikan konseling dan dukungan. Pendampingan dilakukan untuk memandu komunitas dalam mengimplementasikan program-program pencegahan, identifikasi dini, dan reintegrasi sosial yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

Pada komponen pelatihan, memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi anggota komunitas merupakan upaya penting untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan mereka dalam menghadapi tantangan yang dihadapi. Pelatihan dapat mencakup berbagai topik, seperti pengetahuan tentang narkoba dan bahayanya, teknik pencegahan, kemampuan mengidentifikasi tanda-tanda penyalahgunaan, serta keterampilan konseling dan pendampingan bagi individu yang membutuhkan bantuan. Melalui pelatihan ini, anggota komunitas akan memiliki pemahaman yang lebih baik dan dapat berperan secara efektif dalam upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba di lingkungan mereka. Pelatihan juga dapat mencakup pengembangan kemampuan kepemimpinan dan kerja sama tim, sehingga komunitas dapat bekerja secara terorganisir dan terpadu dalam mengatasi permasalahan ini.

Pada komponen pendampingan program, melakukan pendampingan dan bimbingan bagi komunitas merupakan bentuk dukungan dan fasilitasi yang sangat penting untuk membantu mereka mengatasi permasalahan penyalahgunaan

narkotika. Pendampingan dapat dilakukan dengan memberikan konseling, informasi, dan arahan yang relevan bagi kebutuhan masing-masing anggota komunitas. Hal ini mencakup bantuan dalam mengidentifikasi tanda-tanda penyalahgunaan, merujuk ke layanan rehabilitasi yang sesuai, memfasilitasi reintegrasi sosial bagi individu yang telah menjalani rehabilitasi, serta mendukung keluarga dan lingkungan sekitar dalam memahami dan mengatasi permasalahan yang dihadapi. Pendampingan yang berkelanjutan dan berfokus pada kebutuhan spesifik setiap individu akan sangat membantu komunitas dalam membangun ketahanan dan kemampuan mereka untuk menangani masalah penyalahgunaan narkotika secara efektif.

Pada komponen pengembangan program, memfasilitasi pengembangan program-program pencegahan, identifikasi dini, dan reintegrasi sosial merupakan langkah strategis untuk memperkuat upaya penanganan penyalahgunaan narkotika di tingkat komunitas. Pengembangan program-program ini dapat mencakup berbagai inisiatif, seperti kampanye edukasi dan sosialisasi, pelatihan keterampilan hidup, dukungan konseling dan rehabilitasi, serta program reintegrasi sosial bagi individu yang telah menjalani rehabilitasi. Program-program ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi spesifik di masing-masing komunitas, sehingga lebih efektif dalam menjangkau kelompok rentan, mendeteksi kasus penyalahgunaan secara dini, serta membantu individu yang pulih dari ketergantungan untuk kembali beradaptasi dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Fasilitasi pengembangan program-program ini memungkinkan komunitas untuk memiliki peran aktif dan kepemilikan atas upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika di lingkungan mereka.

Salah satu tantangan utama dalam penanganan masalah narkoba di tingkat komunitas adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya program intervensi berbasis komunitas. Badan Narkotika Nasional (2022) dalam laporan tahunannya menyoroti masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang peran mereka dalam mencegah dan mengatasi penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar. Selain itu, rendahnya keterlibatan dan partisipasi aktif komunitas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program intervensi berbasis masyarakat menjadi tantangan tersendiri. Susanto dan Nugroho (2020) menekankan perlunya peningkatan kapasitas pengembangan komunitas agar dapat berperan lebih aktif dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Permasalahan lain yang sering dijumpai adalah keterbatasan kepemimpinan dan keterampilan pengelolaan program pada pengurus komunitas. Sarimaya dan Toding (2021) menemukan bahwa komunitas sering mengalami kesulitan dalam mengelola program intervensi berbasis masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. Selain itu, keterbatasan sumber daya (dana, sarana, dan jaringan) yang dimiliki komunitas juga menghambat pengembangan dan keberlanjutan program intervensi berbasis masyarakat. Wulandari dan Sari (2019) menekankan pentingnya dukungan sumber daya bagi komunitas agar dapat mempertahankan program-program pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Kurangnya koordinasi dan sinergi antara komunitas, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya juga menjadi permasalahan yang harus diatasi. Afriansyah dan Nurhasanah (2018) menemukan bahwa kolaborasi antar pemangku

kepentingan sangat penting untuk mendukung keberlanjutan program intervensi berbasis masyarakat.

Saat ini, program intervensi berbasis masyarakat menjadi salah satu strategi penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan permasalahan penyalahgunaan narkoba di tingkat lokal. Program ini bertujuan untuk melibatkan komunitas secara aktif dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi intervensi yang sesuai dengan kebutuhan serta kondisi masyarakat setempat.

Pendekatan penguatan pemangku kepentingan komunitas dipandang strategis oleh BNN Jakarta Timur dalam mendukung keberhasilan program intervensi berbasis masyarakat. Dengan melibatkan peran aktif komunitas, BNN berharap dapat memperoleh manfaat yang komprehensif, antara lain peningkatan kualitas hidup masyarakat, tersedianya tenaga kerja yang terlatih, intervensi regulasi yang lebih kondusif, serta pemenuhan kewajiban etis organisasi (Lamb dan McKee).

Pertama, melalui kolaborasi dengan komunitas, BNN Jakarta Timur dapat memahami kebutuhan, permasalahan, dan aspirasi yang dihadapi warga di sekitar lokasi operasional. Informasi ini dapat digunakan untuk merancang program-program intervensi yang berdampak positif pada peningkatan kualitas hidup, baik bagi karyawan maupun masyarakat. Inisiatif bersama, seperti penyediaan fasilitas kesehatan, program pemberdayaan ekonomi, atau kegiatan sosial lainnya, juga dapat dikembangkan melalui kolaborasi dengan komunitas (Badan Narkotika Nasional, Grand Design Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2021-2025).

Kedua, BNN dapat mengidentifikasi dan merekrut anggota masyarakat setempat yang berpotensi untuk bergabung sebagai karyawan. Melalui program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang terencana, BNN dapat mempersiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Hal ini tidak hanya menguntungkan BNN, tetapi juga membuka peluang bagi warga komunitas untuk memperoleh pekerjaan dan meningkatkan kualifikasi mereka (Badan Narkotika Nasional, “Rencana Strategis Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024”).

Ketiga, dengan membangun hubungan yang harmonis dengan komunitas, BNN dapat memperoleh dukungan yang lebih baik dari pemerintah daerah setempat. Hal ini dapat mempermudah proses perizinan, pengembangan infrastruktur, serta penyesuaian regulasi yang mendukung implementasi program intervensi berbasis masyarakat. Keterlibatan aktif komunitas juga dapat menjadi saluran bagi BNN untuk menyuarakan kebutuhan dan kepentingan organisasi kepada pemerintah daerah (Badan Narkotika Nasional, “Potensi Desa dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba”).

Selanjutnya, penguatan pemangku kepentingan komunitas juga memenuhi kewajiban etis BNN sebagai organisasi publik. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, BNN dapat menunjukkan komitmennya dalam memperhatikan kepentingan publik, meminimalisir dampak negatif, serta mendorong pembangunan berkelanjutan di lingkungan sekitar (Badan Narkotika Nasional, “Kokohkan Collaborative Government dalam Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika, Badan Narkotika Nasional RI Gendeng Seluruh Stakeholder”).

Tabel 1. 2 Kejadian Kejahatan di Jakarta Timur Tahun 2023

No	Kejahatan	Jumlah
1.	Tindak pidana yang mengancam atau merenggut kehidupan seseorang	30
2.	Tindak pidana yang mengakibatkan cedera atau gangguan pada tubuh seseorang	45
3.	Tindak pidana yang melanggar norma-norma moral dan kesusilaan dalam masyarakat	25
4.	Tindak pidana yang merugikan hak milik orang lain dengan cara menggunakan kekerasan	90
5.	Tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan, peredaran, atau produksi narkoba dan zat adiktif lainnya	120
6.	Tindak pidana yang melibatkan penipuan, penggelapan harta, serta penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi	70

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2023

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, angka kejadian kejahatan di Jakarta Timur pada tahun 2023 menunjukkan bahwa kejahatan terkait narkoba merupakan salah satu jenis kejahatan yang paling sering terjadi dan menjadi perhatian serius pemerintah. Tabel yang tersedia mencatat bahwa kasus yang disebabkan oleh tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan, peredaran, atau produksi narkoba dan zat adiktif lainnya mencapai total 120 kasus. Sementara itu, tindak pidana kedua yang paling banyak terjadi adalah penipuan, penggelapan harta, dan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, dengan jumlah 70 kasus. Selain itu, terdapat juga 90 kasus tindak pidana yang merugikan hak milik orang lain dengan cara menggunakan kekerasan. Data ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam penanganan

kejahatan, serta perlunya strategi yang lebih efektif untuk mencegah dan menangani tindak pidana lainnya. Keberhasilan dalam mengurangi angka kejahatan ini sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait.

**Tabel 1. 3 Jumlah Kasus Narkotika berdasarkan Kabupaten/Kota di
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023**

Wilayah	Kep. Seribu	Jaksel	Jaktim	Jakpus	Jakbar	Jakut	DKI Jakarta
Kasus	15	120	120	80	90	110	535

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2023

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023, Provinsi DKI Jakarta menghadapi tantangan serius terkait permasalahan narkoba di berbagai wilayahnya. Secara keseluruhan, tercatat sebanyak 515 kasus narkoba yang terjadi di seluruh Kota Administrasi di DKI Jakarta. Wilayah yang memiliki jumlah kasus narkoba tertinggi adalah Jakarta Selatan dengan 120 kasus. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kepadatan penduduk, aktivitas ekonomi, serta kemudahan akses ke pusat-pusat kegiatan di ibu kota. Selain itu, Jakarta Timur juga mencatat jumlah kasus narkoba yang signifikan, yaitu 100 kasus. Meskipun tidak setinggi Jakarta Selatan, angka ini masih menjadi perhatian pemerintah. Di sisi lain, Kepulauan Seribu mencatat kasus narkoba terkecil, yaitu 15 kasus, yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Provinsi DKI Jakarta. Data ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam penanganan masalah narkoba di Jakarta.

Tabel 1. 4 Kasus Kejahatan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Uraian Kasus	Kep. Seribu	Jaksel	Jaktim	Jakpus	Jakbar	Jakut	DKI Jakarta
Narkotika	50	300	250	200	220	270	1.290

Sumber : Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka 2023, BPS Provinsi DKI Jakarta.

Angka kejahatan pada tahun 2023 di wilayah Provinsi DKI Jakarta, menurut data dari BPS Provinsi DKI Jakarta, menunjukkan jumlah yang signifikan jika dibandingkan dengan kasus kejahatan lainnya. Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa kasus kejahatan tertinggi berada di urutan pertama di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan 300 kasus. Urutan kedua adalah Jakarta Timur dengan 250 kasus. Urutan ketiga adalah Jakarta Pusat dengan 200 kasus. Urutan keempat adalah Jakarta Utara dengan 270 kasus. Urutan kelima adalah Jakarta Barat dengan 220 kasus, dan urutan keenam adalah Kabupaten Kepulauan Seribu dengan 50 kasus. Jika ditotal secara keseluruhan, kasus tindak kejahatan di wilayah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023 mencapai 1.290 kasus. Data ini menyoroti perlunya perhatian lebih dalam upaya penanganan dan pencegahan kejahatan di wilayah ini.

Badan Narkotika Nasional (BNN) telah mengambil berbagai langkah strategis, termasuk pendekatan soft power, hard power, dan smart power. Dalam konteks strategi soft power, BNN fokus pada tindakan pencegahan untuk meningkatkan ketahanan dan daya tangkal masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba. Berbagai upaya pencegahan yang telah dilakukan oleh BNN meliputi advokasi dan penyebaran informasi melalui sejumlah program, seperti penguatan ketahanan keluarga berbasis sumber daya pembangunan desa, pelatihan

pengembangan keterampilan lunak di kalangan pelajar, pembentukan kelompok sebaya remaja anti narkoba melalui dialog interaktif, pelatihan teknis untuk ketahanan keluarga anti narkoba, pengembangan ketahanan keluarga, asistensi dalam pelaksanaan desa bersih narkoba, serta intervensi ketahanan keluarga yang mengandalkan sumber daya pembangunan desa. (BNNP DKI Jakarta, 2023)

Selain melakukan upaya pencegahan dalam strategi smart power approach, Badan Narkotika Nasional (BNN) juga menerapkan strategi hard power approach dengan memberdayakan masyarakat. Ini dilakukan dengan mendorong partisipasi masyarakat melalui pembentukan kelompok penggiat anti narkoba, pelaksanaan tes urine, dan intervensi program pemberdayaan masyarakat yang dikenal sebagai Grand Design Alternative Development (GDAD). Program ini mencakup kegiatan penggantian lahan yang sebelumnya ditanami ganja menjadi tanaman komoditas alternatif yang memiliki nilai ekonomi, serta pelatihan kewirausahaan dan peningkatan keterampilan hidup. Selain itu, BNN juga mengimplementasikan upaya pemulihan bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi, dengan membentuk unit rehabilitasi yang melibatkan kelompok masyarakat, yang disebut Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM). Mereka juga menyediakan layanan pendampingan dan pemulihan bagi mantan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba setelah proses rehabilitasi. (BNNP DKI Jakarta, 2023).

Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam penanganan penyalahgunaan narkoba di Indonesia, memiliki peran penting dalam melibatkan masyarakat sebagai pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan

narkoba. Salah satu program yang dijalankan BNN adalah Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang bertujuan untuk memberdayakan komunitas di wilayah Jakarta Timur. Melalui program IBM, BNN berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencegah dan menangani permasalahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan mereka. Dengan demikian, pengembangan komunitas oleh BNN melalui program IBM di Jakarta Timur menjadi penting untuk dikaji lebih mendalam, guna memahami sejauh mana efektivitas dan dampak dari program tersebut terhadap pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, akan dilakukan penelitian yang berjudul **"ANALISIS PENGEMBANGAN KOMUNITAS DALAM PROGRAM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) JAKARTA TIMUR"**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah, yaitu:

1. Masih rendahnya partisipasi komunitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dan kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap implementasi program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM). (Halaman 9)
2. Tingginya angka kejahatan yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba. (Halaman 12)
3. BNN Jakarta Timur dalam menjalankan program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) masih rendah dalam melibatkan partisipasi dan keterlibatan komunitas. (Halaman 14)

4. Kurangnya koordinasi dan sinergi antara komunitas, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung keberlanjutan program intervensi berbasis masyarakat di Jakarta Timur. (Halaman 7)

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana BNN Jakarta Timur mengembangkan komunitas dalam program intervensi berbasis masyarakat?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengembangan komunitas dalam program IBM?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis proses BNN dalam mengembangkan komunitas di Jakarta Timur agar dapat mengelola program intervensi berbasis masyarakat secara berkelanjutan.
2. Menganalisis faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pengembangan komunitas dalam program intervensi berbasis masyarakat.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dengan adanya penelitian ini adalah:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta dapat memberikan wawasan bagi para pembaca terkait dengan teori-teori yang berkaitan dengan pengembangan komunitas.

1.5.2 Manfaat Praktis

- Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan serta menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai Analisis Pengembangan Komunitas dalam Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) oleh BNN Jakarta Timur.

- Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sumber referensi dan informasi yang bermanfaat bagi pembaca serta dapat menambahkan wawasan mengenai ilmu pengetahuan tentang administrasi publik khususnya di bidang pengembangan komunitas dalam sebuah program.

- Bagi Badan Narkotika Nasional (BNN) Jakarta Timur

Hasil penelitian karya ilmiah ini dapat dijadikan sumber referensi dan informasi untuk penganalisis Analisis Pengembangan Komunitas dalam Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM).

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 5 Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian/Judul Penelitian	Tujuan Penelitian dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Peneliti: Anak Agung Putu Sugiantiningsih Judul Penelitian: Peran Organisasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dalam Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengedaran Gelap Narkotika di Desa Pemongan, Denpasar Jurnal Visi Sosial Humaniora Vol.4 No.2 2023	Tujuan Penelitian: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dalam mendukung program Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengedaran Gelap Narkotika yang dilaksanakan di Desa Pemogan, Denpasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak dan efektivitas program tersebut dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika serta memberdayakan masyarakat lokal. Metode Penelitian: Menggunakan metode penelitian kualitatif	Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa Badan Narkotika Nasional bekerja sama dengan masyarakat di Desa Pemogan dalam upaya pencegahan dan pemberdayaan komunitas. Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Desa Pemogan perlu melaksanakan berbagai tindakan untuk mencegah penyalahgunaan narkotika, termasuk rehabilitasi, penindakan terhadap para bandar dan sindikat, serta memutuskan jalur peredaran narkotika yang ilegal. Namun, dalam pelaksanaannya, organisasi yang terlibat dalam Intervensi Berbasis Masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan.

2.	Peneliti: Purnamasari Novianti Nuryati Tati Judul Evaluasi Implementasi Program Intervensi Berbasis Masyarakat di Wilayah Jakarta Utara Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Muli Vol. 8 No. 2 2022	Tujuan Penelitian: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana masyarakat menerima program rehabilitasi, memahami, dan dapat melaksanakan Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dengan baik. Hal ini bertujuan agar klien rehabilitasi dapat kembali pulih, menjadi produktif, dan berfungsi kembali dalam masyarakat. Metode Penelitian: Menggunakan metode penelitian kualitatif	Hasil penelitian ini mengevaluasi kegiatan dan layanan program IBM yang dilaksanakan oleh BNN Kota Jakarta Utara dan petugas agen pemulihan setempat. Indikator yang dianalisis mencakup kesesuaian antara program yang dijalankan dengan hasil yang diharapkan, yang berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan program di lapangan. Evaluasi ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai efektivitas program dan dampaknya terhadap masyarakat, serta identifikasi area yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi.
3.	Peneliti: Gunawan Tony Kurniasih Denok Tobirin Judul Intervensi Berbasis Masyarakat: Collaborative Governance dalam Penanganan Rehabilitasi Narkoba	Tujuan Penelitian: Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami kebijakan dalam mengatasi persoalan narkoba melalui modal sosial dan pemberdayaan masyarakat yang berlandaskan pada konsep collaborative governance. Metode Penelitian:	Hasil penelitian ini menunjukkan pengembangan implementasi kebijakan yang menggunakan pendekatan komunal melalui Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM). Dengan menerapkan konsep collaborative governance, pemerintah berusaha untuk mengintegrasikan modal sosial yang ada dalam masyarakat guna memberdayakan individu dan kelompok dalam proses rehabilitasi. Modal sosial ini berfungsi sebagai dasar untuk kolaborasi, memungkinkan berbagai pihak untuk bekerja sama secara efektif dalam

		Menggunakan metode penelitian kualitatif	menangani masalah penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana sinergi antara pemerintah dan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas program rehabilitasi serta menciptakan lingkungan yang lebih suportif bagi individu yang membutuhkan bantuan.
4.	Peneliti : Arwan Arwan Sadli Syam Rasyika Nurul Fadriah Sulfiyanti Muhammad Ryman Napirah Judul Community-Based Intervention: A Case Study of Pantoloan Boya Village Community Through the Rehabilitation Program of the National Narcotics Agency, Palu City	Tujuan Penelitian: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Intervensi Berbasis Komunitas (IBM) di bidang rehabilitasi yang dilaksanakan oleh BNN Kota Palu di Kelurahan Pantoloan Boya. Metode Penelitian: Menggunakan metode penelitian kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemetaan dilakukan oleh Recovery Agent (RA) berbasis RW (Hamlet)/RT (Lingkungan) dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang minim dan klien yang mengikuti intervensi secara terbatas. Penjangkauan adalah penyampaian informasi dan pendekatan kepada masyarakat, keluarga, dan pengguna narkoba.
5.	Peneliti : Trish Hafford-Letchfield Tricia McQuarrie Carmel Clancy Betsy Thom	Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pencegahan dan intervensi yang dirancang khusus untuk lansia.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intervensi yang ditujukan khusus untuk lansia perlu fokus pada peningkatan kesehatan mental dan fungsi sosial mereka. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan, dengan mempertimbangkan kebutuhan unik yang dimiliki oleh kelompok usia ini.

	Briony Jain Judul Community-Based Interventions for Problematic Substance Use in Later Life: A Systematic Review of Evaluated Studies and Their Outcomes	Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, kuantitatif, serta metode mixed methods.	Melalui program yang terintegrasi, diharapkan lansia dapat memperoleh dukungan yang memadai, baik dari segi emosional maupun sosial, sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam masyarakat dan menikmati kehidupan yang lebih berkualitas. Penelitian ini menekankan pentingnya pengembangan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan dalam merespons tantangan yang dihadapi oleh lansia.
6.	Peneliti : I Gusti Agung Istri Cahyani Dinar Saurmauli Lubis Judul Implementation of the Community Empowerment Program at the National Narcotics Agency of Denpasar City in 2019	Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh BNNK Denpasar. Metode Penelitian Menggunakan metode penelitian kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga mitra BNNK, baik dari pemerintah maupun masyarakat, telah melaksanakan kegiatan pendidikan kesehatan untuk mendukung program pencegahan penyalahgunaan narkoba. Kegiatan yang dilakukan mencakup sosialisasi dan tes urin, yang didanai oleh Pemerintah Kota Denpasar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Namun, penelitian ini mengindikasikan bahwa kinerja program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh BNNK belum mencapai target yang diharapkan. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain adalah belum adanya Peraturan Walikota yang mengatur, kurangnya kesepakatan tertulis dengan mitra, serta ketiadaan aktivis atau penanggung jawab yang ditunjuk oleh organisasi mitra untuk fokus pada upaya anti-narkoba. Penelitian ini merekomendasikan agar BNNK terus melakukan advokasi kepada pemerintah kota dan mitranya untuk merumuskan peraturan tertulis mengenai pencegahan penyalahgunaan narkoba. Selain itu, BNNK juga disarankan untuk mencari sumber pendanaan

			alternatif, seperti tanggung jawab sosial perusahaan dan dana desa, guna mendukung kegiatan anti-narkoba yang lebih efektif di organisasi mitra.
7.	Peneliti : Rokiah Kusumapradja Yayah Karyanah Sulis Maryanti Judul The Development of a Campus Community Empowerment Model in Drug Abuse Prevention Behavior	Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan model pemberdayaan masyarakat kampus dalam perilaku pencegahan penyalahgunaan narkoba di Universitas Esa Unggul. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif.	Penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Ketiga variabel bebas—kondisi keluarga, faktor teman sebaya, dan lingkungan kampus—memiliki kontribusi terhadap perilaku pencegahan penyalahgunaan narkoba sebesar 30,7%. (2) Peningkatan faktor kondisi keluarga berhubungan positif dengan perilaku pencegahan penyalahgunaan narkoba, yang menunjukkan skor 1,516 poin setelah mempertimbangkan pengaruh faktor teman sebaya dan lingkungan kampus. (3) Dari ketiga faktor tersebut, faktor lingkungan kampus memiliki pengaruh terbesar terhadap perilaku pencegahan penyalahgunaan narkoba. Temuan ini menunjukkan pentingnya lingkungan kampus yang mendukung dalam upaya pencegahan, serta perlunya strategi pemberdayaan yang melibatkan semua elemen komunitas kampus untuk menciptakan atmosfer yang kondusif bagi pengurangan risiko penyalahgunaan narkoba.
8.	Peneliti : I Gusti Ngurah Anom Ni Putu Noni Suharyanti I Wayan Eka Artajaya	Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana desa adat di Bali melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan narkoba berdasarkan kebijakan lokal.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan penyalahgunaan narkoba yang diatur dalam awig-awig atau pararem desa adat di Bali merupakan salah satu bentuk pemberdayaan desa adat. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta desa adat dalam mendukung pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan serta peredaran narkoba, termasuk perdagangan manusia. Dengan

	Judul The Empowerment of Customary Villages in Bali in Prevention and Countermeasures of Narcotics Crimes Based on Local Wisdom	Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis.	adanya peraturan lokal ini, desa adat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, serta berkontribusi dalam upaya menjaga moralitas dan kesejahteraan masyarakat. Temuan ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara institusi lokal dan pemerintah dalam menghadapi masalah narkoba secara efektif.
9.	Peneliti : Moch Yusuf Syaifudin Judul Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui Desa Wisata (Studi di Desa Jurug, Kabupaten Ponorogo)	Tujuan Penelitian ujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Pemerintah Desa Jurug dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui program desa wisata Jurug. Metode Penelitian Menggunakan metode penelitian kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Desa Jurug dalam merumuskan kebijakan terkait pengembangan desa wisata telah berjalan dengan baik. Namun, dalam pelaksanaan program dan pembinaan, masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki. Beberapa faktor penghambat yang diidentifikasi meliputi kurangnya tindak lanjut dari sosialisasi, rendahnya partisipasi masyarakat, masalah alokasi dana, serta permasalahan limbah kotoran hewan yang mencemari aliran sungai. Meskipun Pemerintah Desa Jurug telah melakukan pembinaan di bidang ekonomi, kepemudaan, dan keagamaan, pembinaan di bidang kepemudaan dan keagamaan masih belum optimal. Hal ini terlihat dari belum adanya kelembagaan kepemudaan yang dapat menjadi wadah bagi pemuda untuk berpartisipasi aktif dalam program yang dijalankan. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu memperkuat perannya dalam mengimplementasikan kebijakan, mencari solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada, serta memberikan fasilitas yang memadai di bidang kepemudaan dan keagamaan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan program desa wisata dapat berkembang

			lebih baik dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
10.	Peneliti : Ihwan Ridwan Asdar Dollo A. Andriyani Judul Implementasi Pendekatan Participatory Rural Appraisal pada Program Pelatihan	Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA) dalam program pelatihan pengolahan hasil pertanian dan model pemberdayaan masyarakat. Metode Penelitian Menggunakan metode penelitian kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan PRA terbukti efektif dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan rumah produksi yang berbasis teknologi informasi. Model PRA yang dikembangkan bersama pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) menunjukkan bahwa pada tahap refleksi, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi yang sistematis pada tahap perencanaan dan tindakan. Hal ini penting untuk mengetahui output dan outcome dari kegiatan pelatihan yang telah dilaksanakan. Dengan adanya monitoring dan evaluasi yang baik, program pelatihan dapat disesuaikan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga hasil yang dicapai dapat lebih optimal dan berdampak positif dalam pemberdayaan masyarakat.
11.	Peneliti : Sutikno Eddy Setiadi Soedjono Agnes Tuti Rumiati Lantip Trisunarno	Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk menyusun program-program pengentasan kemiskinan melalui model pemberdayaan masyarakat serta mengkaji kembali proses penentuan program sebagai evaluasi efektivitas program pengentasan	Berdasarkan hasil analisis SWOT dan scoring, program-program yang terpilih mencakup pelatihan dan pendampingan wirausaha, pendirian koperasi simpan pinjam, pengadaan air bersih untuk Rumah Tangga Miskin (RTM), pengembangan desa melalui pemanfaatan air bersih, penanganan sampah rumah tangga, serta program pendidikan Paket A, B, dan C. Program-program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan

	Judul Pemilihan Program Pengentasan Kemiskinan melalui Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat dengan Pendekatan Sistem	kemiskinan yang dinilai masih belum berjalan dengan baik. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis SWOT.	pendekatan yang berfokus pada pemberdayaan, diharapkan masyarakat dapat lebih mandiri dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan ekonomi.
12.	Peneliti : Kadek Arya Putra Gunawan I Nyoman Bagiastra Judul Eksistensi Tim Intervensi Berbasis Masyarakat dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkotika di Desa Sangsit	Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keberadaan tim intervensi berbasis masyarakat dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika, serta mengidentifikasi upaya yang dilakukan dan kendala yang dihadapi dalam memberantas penyalahgunaan narkotika. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan teknik pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilaksanakan oleh tim intervensi mencakup tindakan pre-emptive dan preventif. Namun, kendala yang dihadapi sangat signifikan, terutama pada tahap awal pembentukan tim, di mana keberadaan mereka sering dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Selain itu, terdapat kendala dalam hal tempat pelayanan dan ketersediaan dana. Akses terhadap Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) juga sangat terbatas, yang hanya mencakup pendampingan dan pengawasan. Selain itu, banyak keluarga atau orang tua yang menolak ketika anak mereka diusulkan untuk direhabilitasi. Temuan ini menyoroti perlunya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi dan dukungan yang lebih kuat dari semua pihak untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika secara efektif.
13.	Peneliti : Icha Fitria Rahma Mahfudz Sidiq	Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Narkotika Nasional dalam	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Badan Narkotika Nasional dalam mengurangi penyalahgunaan narkoba melalui Intervensi Berbasis Masyarakat meliputi beberapa aspek penting. Pertama, mereka berperan dalam

	Arif Budhy Santoso Agung Nugroho Puspito Judul Peran Badan Narkotika Nasional dalam Intervensi Berbasis Masyarakat untuk Mengurangi Penyalahgunaan Narkoba (Studi Deskriptif pada Remaja di Desa Pesangrahan, Kota Batu)	mengurangi penyalahgunaan narkoba melalui Intervensi Berbasis Masyarakat. Metode Penelitian Menggunakan metode penelitian kualitatif	merumuskan dan membentuk awal Program Intervensi Berbasis Masyarakat. Selanjutnya, Badan Narkotika Nasional memberikan asistensi dalam pendampingan, membantu masyarakat menghadapi berbagai hambatan yang mungkin muncul. Selain itu, mereka juga berfungsi sebagai fasilitator dengan memberikan motivasi dan dukungan kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dalam program. Monitoring awal dan akhir dilakukan untuk mencatat kelemahan serta permasalahan yang ditemui selama pelaksanaan program. Akhirnya, evaluasi dilakukan untuk menilai apakah program atau kegiatan yang dilaksanakan mencapai hasil yang diinginkan, yang menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai perencanaan dan implementasi program selanjutnya.
14.	Peneliti : Salamatul Fuadah Judul Strategi Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Cilegon dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja Usia Sekolah	Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pemberdayaan masyarakat yang diterapkan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja usia sekolah.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari perumusan strategi yang digunakan, yang dinilai kurang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan remaja saat ini. Penelitian ini mengindikasikan perlunya evaluasi dan pembaruan strategi yang lebih adaptif dan relevan, agar program pencegahan dapat lebih efektif dalam menjangkau dan memberdayakan remaja di Cilegon. Dengan demikian, diharapkan pencegahan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan dengan lebih baik, sehingga dapat mengurangi angka penyalahgunaan di kalangan generasi muda.

		Metode Penelitian Menggunakan metode penelitian kualitatif	
15.	Peneliti : Dindin Supratman Arthur Josian Simon Runturambi Judul Sinergitas Badan Narkotika Nasional Melalui Penggiat Nasional Anti Narkoba dalam Upaya Formulasi Pemberdayaan Masyarakat	Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan sinergitas Lembaga Badan Narkotika Nasional dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Metode Penelitian Menggunakan metode penelitian kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan para penggiat anti-narkoba yang ada di kementerian dan lembaga dibangun dengan prinsip pengembangan, pemberdayaan, dan kemandirian. Sinergitas antara Badan Narkotika Nasional dan lembaga terkait lainnya telah menciptakan kerangka kerja yang kolaboratif, di mana setiap pihak berkontribusi dalam upaya meningkatkan kapasitas masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba, tetapi juga untuk membangun kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam program-program pencegahan. Temuan ini menekankan pentingnya keberlanjutan dalam upaya pemberdayaan, serta perlunya dukungan yang konsisten dari semua pihak untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Pada penelitian pertama, berjudul “Peran Organisasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dalam Pencegahan Pemberantasan dan Pengedaran Gelap Narkotika di Desa Pemongan Denpasar” bertujuan untuk menganalisis peran IBM dalam program pencegahan dan pemberantasan narkotika di Desa Pemongan, Denpasar. Metode yang digunakan adalah kualitatif, dan hasilnya menunjukkan bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dan pemberantasan sindikat. Namun, organisasi ini menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menekankan pentingnya peran IBM dalam pencegahan narkoba di tingkat masyarakat. Keterkaitan dengan analisis pengembangan komunitas oleh BNN Jakarta Timur sangat signifikan, karena keduanya menyoroti pentingnya kolaborasi antara BNN dan masyarakat, serta partisipasi aktif warga dalam keberhasilan program intervensi.

Penelitian kedua yang berjudul, “Evaluasi Implementasi Program Intervensi Berbasis Masyarakat di Wilayah Jakarta Utara” bertujuan untuk menilai penerimaan masyarakat terhadap program rehabilitasi dan pelaksanaan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Jakarta Utara. Menggunakan metode kualitatif, penelitian ini mengevaluasi kegiatan dan layanan program IBM serta kesesuaian antara program dan hasil yang diharapkan. Hasil penelitian menekankan pentingnya evaluasi untuk mencapai tujuan rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat dalam menangani penyalahgunaan narkotika. Keterkaitan dengan analisis pengembangan komunitas oleh BNN Jakarta Timur menunjukkan fokus pada kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, di mana

penerimaan masyarakat berperan penting dalam keberhasilan program, sejalan dengan prinsip partisipasi aktif warga.

Penelitian ketiga yang berjudul, “Intervensi Berbasis Masyarakat: Collaborative Governance dalam Penanganan Rehabilitasi Narkoba” bertujuan untuk menganalisis kebijakan penanganan masalah narkoba melalui modal sosial dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan prinsip collaborative governance. Metode yang digunakan adalah kualitatif, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan komunal dalam program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) efektif untuk mengintegrasikan modal sosial ke dalam rehabilitasi. Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait dalam mengatasi permasalahan narkoba. Keterkaitan dengan analisis pengembangan komunitas oleh BNN Jakarta Timur menunjukkan relevansi kolaborasi multi-pihak dalam keberhasilan program rehabilitasi, yang bergantung pada penguatan modal sosial dan pemberdayaan komunitas.

Penelitian keempat yang berjudul “Community-Based Intervention: A Case Study of Pantoloan Boya Village Community Through the Rehabilitation Field Program of National Narcotics Agency, Palu City” bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Program Intervensi Berbasis Komunitas (CBI) di bidang rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palu di Kelurahan Pantoloan Boya. Metode yang digunakan adalah kualitatif, dan hasilnya menunjukkan bahwa pemetaan oleh Recovery Agent (RA) dilakukan dengan sumber daya manusia terbatas, serta partisipasi klien yang minim. Penjangkauan dilakukan melalui informasi kepada masyarakat dan pengguna narkoba. Penelitian ini menekankan

pentingnya optimalisasi program CBI untuk meningkatkan keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan masalah narkoba. Keterkaitan dengan analisis pengembangan komunitas oleh BNN Jakarta Timur menunjukkan bahwa keberhasilan rehabilitasi berbasis masyarakat bergantung pada partisipasi aktif komunitas dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

Penelitian “Community Based Interventions for Problematic Substance Use in Later Life” menganalisis pencegahan dan intervensi untuk lansia dengan masalah penyalahgunaan zat. Menggunakan metode kualitatif, kuantitatif, dan mixed methods, penelitian ini menemukan bahwa intervensi harus fokus pada peningkatan kesehatan mental dan fungsi sosial lansia. Pendekatan holistik dapat mengatasi isolasi sosial dan mendukung pemberdayaan mereka. Kaitannya dengan analisis pengembangan komunitas oleh BNN Jakarta Timur terletak pada penekanan keduanya terhadap dukungan komunitas. Program BNN Jakarta Timur juga menekankan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menangani penyalahgunaan narkoba. Keduanya menunjukkan bahwa keberhasilan intervensi bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dan pengembangan strategi yang sesuai dengan kebutuhan kelompok rentan. Pendekatan inklusif dan dukungan yang memadai sangat penting untuk meningkatkan efektivitas program dan kualitas hidup masyarakat.

Penelitian keenam yang berjudul Penelitian “Implementation of Community Empowerment Program at National Narcotics Agency of Denpasar City in 2019” bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat oleh BNNK Denpasar. Dengan metode kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa

mitra BNNK telah melakukan kegiatan pendidikan kesehatan untuk mendukung pencegahan penyalahgunaan narkoba, namun kinerja program belum mencapai target. Kendala termasuk kurangnya Peraturan Walikota, kesepakatan tertulis dengan mitra, dan penanggung jawab aktivis anti narkoba. Penelitian merekomendasikan advokasi untuk peraturan tertulis dan pencarian pendanaan tambahan. Keterkaitan dengan program di Jakarta Timur menyoroti pentingnya kolaborasi dan regulasi untuk meningkatkan hasil pemberdayaan masyarakat. Dengan memperkuat kerjasama antar stakeholder, kedua program dapat lebih efektif dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di komunitas.

Penelitian tujuh yang berjudul “The Development Of Campus Community Empowerment Model In Drug Abuse Prevention Behavior” oleh Rokiah Kusumapradja, Yayah Karyanah, dan Sulis Maryanti bertujuan untuk mengembangkan model pemberdayaan masyarakat kampus dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di Universitas Esa Unggul. Metode yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif, dan hasilnya menunjukkan bahwa variabel kondisi keluarga, teman sebaya, dan lingkungan kampus mempengaruhi perilaku pencegahan narkoba sebesar 30,7%. Dari ketiga faktor, lingkungan kampus memiliki pengaruh terbesar. Penelitian ini menghasilkan model pemberdayaan yang dapat meningkatkan pencegahan penyalahgunaan narkoba di kampus. Keterkaitan dengan analisis pengembangan komunitas oleh BNN Jakarta Timur terlihat pada pendekatan serupa dalam memberdayakan masyarakat. Program di Jakarta Timur juga menekankan kolaborasi antara keluarga, teman, dan institusi pendidikan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pencegahan.

Penelitian kelapan yang berjudul “The Empowerment Of Customary Villages In Bali In Preventions And Countermeasures Of Narcotics Crimes Based On Local Wisdom” bertujuan untuk mengkaji bagaimana desa adat di Bali mencegah dan menangani kejahatan narkoba dengan kearifan lokal. Menggunakan pendekatan yuridis empiris dan analitis, hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan penyalahgunaan narkoba dalam awig-awig atau pararem desa merupakan bentuk pemberdayaan yang meningkatkan peran desa adat dalam mendukung pemerintah. Penelitian ini menyoroti upaya pemberdayaan desa adat di Bali dalam penanggulangan narkoba. Keterkaitannya dengan analisis pengembangan komunitas oleh BNN Jakarta Timur terlihat pada pendekatan kolaboratif yang diambil, di mana program intervensi berbasis masyarakat juga mengedepankan pemberdayaan komunitas untuk menciptakan kesadaran kolektif dan dukungan terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Penelitian kesembilan yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata” menganalisis peran Pemerintah Desa Jurug dalam pembangunan masyarakat melalui program desa wisata dengan metode kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pengembangan desa wisata telah dirumuskan dengan baik, pelaksanaan dan pembinaan masih kurang optimal. Terdapat faktor penghambat seperti kurangnya sosialisasi, rendahnya partisipasi masyarakat, dan alokasi dana terbatas. Pembinaan di bidang kepemudaan dan keagamaan juga belum maksimal. Pemerintah Desa Jurug perlu memperkuat implementasi kebijakan dan mencari solusi untuk kendala yang ada. Keterkaitannya dengan analisis pengembangan komunitas oleh BNN Jakarta Timur menekankan pentingnya peran pemerintah

lokal dalam memberdayakan masyarakat. Di Jakarta Timur, program intervensi berbasis masyarakat juga fokus pada kolaborasi antara pemerintah dan komunitas untuk mencapai tujuan pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Penelitian kesepuluh yang berjudul Penelitian “Implementasi Pendekatan Participatory Rural Appraisal pada Program Pelatihan” bertujuan untuk mengkaji penerapan pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA) dalam pelatihan pengolahan hasil pertanian. Metode yang digunakan adalah kualitatif, dan hasilnya menunjukkan bahwa PRA efektif dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui rumah produksi berbasis teknologi informasi. Model PRA yang dikembangkan oleh pengelola PKBM menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi dalam perencanaan dan tindakan untuk menilai output dan outcome pelatihan. Keterkaitannya dengan analisis pengembangan komunitas oleh BNN Jakarta Timur terletak pada prinsip kolaboratif yang sama. Di Jakarta Timur, program intervensi berbasis masyarakat juga menekankan partisipasi aktif komunitas dalam merumuskan dan melaksanakan program pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Penelitian kesebelas yang berjudul “Pemilihan Program Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Dengan Pendekatan Sistem” bertujuan menyusun dan mengevaluasi program pengentasan kemiskinan. Dengan analisis deskriptif dan SWOT, program terpilih meliputi pelatihan wirausaha, koperasi, pengadaan air bersih, pengembangan desa, penanganan sampah, dan pendidikan Paket A, B, dan C. Pendekatan sistem diharapkan dapat meningkatkan efektivitas upaya pengentasan kemiskinan.

Kaitannya dengan Analisis Pengembangan Komunitas oleh BNN Jakarta Timur terletak pada pemberdayaan masyarakat yang serupa. Program di Jakarta Timur menekankan kolaborasi untuk menangani penyalahgunaan narkoba, bertujuan menciptakan solusi berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Penelitian kedua belas yang berjudul “Eksistensi Tim Intervensi Berbasis Masyarakat Dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkotika Di Desa Sangsit” bertujuan untuk mengkaji keberadaan tim intervensi dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika, termasuk upaya dan kendala yang dihadapi. Menggunakan metode hukum empiris, hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya tim mencakup tindakan pre-emptif dan preventif, namun mereka menghadapi kendala seperti pandangan negatif masyarakat, keterbatasan tempat pelayanan dan dana, serta penolakan dari keluarga terhadap rehabilitasi. Kaitannya dengan Analisis Pengembangan Komunitas oleh BNN Jakarta Timur terletak pada pentingnya kolaborasi dan dukungan masyarakat. Program di Jakarta Timur juga mengalami tantangan serupa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengatasi stigma rehabilitasi. Keduanya menekankan perlunya kesadaran dan dukungan dari semua pihak untuk mengatasi penyalahgunaan narkotika secara efektif.

Penelitian ketiga belas yang berjudul “Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Intervensi Berbasis Masyarakat Untuk Mengurangi Penyalahgunaan Narkoba” bertujuan untuk mengkaji peran BNN dalam mengurangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di Desa Pesanggrahan, Kota Batu. Menggunakan metode kualitatif, hasilnya menunjukkan bahwa peran BNN

mencakup: (1) pembentukan program intervensi, (2) asistensi pendampingan, (3) fasilitasi motivasi, (4) monitoring untuk mencatat kelemahan, dan (5) evaluasi hasil program. Kaitannya dengan Analisis Pengembangan Komunitas oleh BNN Jakarta Timur terlihat pada peran serupa dalam memberdayakan masyarakat. Di Jakarta Timur, pendekatan intervensi juga menekankan fasilitasi, pendampingan, dan evaluasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Keduanya menyoroti pentingnya kolaborasi antara BNN dan masyarakat dalam efektivitas pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Penelitian keempat belas yang berjudul “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Cilegon Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja Usia Sekolah” bertujuan untuk mengkaji strategi BNN Kota Cilegon dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Menggunakan metode kualitatif, hasilnya menunjukkan bahwa upaya pencegahan BNN belum optimal karena strategi yang diterapkan tidak sesuai dengan perkembangan terkini. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan dan inovasi strategi pemberdayaan masyarakat. Kaitannya dengan Analisis Pengembangan Komunitas oleh BNN Jakarta Timur terletak pada tantangan serupa dalam mengembangkan strategi yang responsif terhadap kebutuhan komunitas. Program di Jakarta Timur juga menyarankan penyesuaian pendekatan untuk meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, menekankan pentingnya strategi yang adaptif dan kolaboratif dalam menghadapi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.

Penelitian kelima belas yang berjudul “Sinergitas Badan Narkotika Nasional Melalui Penggiat Nasional Anti Narkoba Dalam Upaya Formulasi Pemberdayaan Masyarakat” bertujuan untuk menganalisis sinergi BNN dalam pemberdayaan masyarakat. Menggunakan metode kualitatif, hasilnya menunjukkan bahwa pemberdayaan penggiat anti-narkoba di kementerian/lembaga dibangun atas prinsip pengembangan, pemberdayaan, dan kemandirian. BNN berkolaborasi dengan berbagai lembaga untuk merumuskan strategi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Analisis pengembangan komunitas oleh BNN Jakarta Timur menekankan pentingnya kolaborasi dan partisipasi masyarakat. Program-program yang dilaksanakan di Jakarta Timur juga memberikan penekanan pada sinergi antara lembaga pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada dukungan yang berkelanjutan dan partisipasi aktif dari komunitas. Penelitian ini berfokus pada analisis pengembangan komunitas dalam Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang dilaksanakan oleh BNN Jakarta Timur. Sementara itu, penelitian-penelitian sebelumnya memiliki fokus yang lebih beragam, seperti peran organisasi IBM dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba di Denpasar (Anak Agung, 2023), evaluasi implementasi program IBM di Jakarta Utara (Nuryanti Tati, 2022), kolaborasi pemerintahan dalam penanganan rehabilitasi narkoba (Gunawan Tony), serta implementasi program pemberdayaan masyarakat oleh BNN Denpasar. Berbagai penelitian ini juga menyoroti beragam pendekatan terkait pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di berbagai daerah. Meskipun terdapat kesamaan dalam tema besar

mengenai Intervensi Berbasis Masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, penelitian ini lebih spesifik dalam menganalisis implementasi pengembangan komunitas oleh BNN di wilayah Jakarta Timur. Fokus ini memberikan kedalaman yang lebih dalam mengenai lokasi dan pelaksanaan program IBM oleh BNN, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam konteks lokal.

1.6.2 Administrasi Publik

Administrasi publik melibatkan pengorganisasian dan koordinasi sumber daya serta personel publik untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengawasi keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik. (Keban 2014:3) Ini menunjukkan bahwa administrasi publik mencakup elemen seni dan ilmu yang berfokus pada pengelolaan urusan publik dan pelaksanaan berbagai tugas yang telah ditetapkan. McCurdy (1986) literatur tersebut menunjukkan bahwa administrasi publik merupakan bagian dari proses politik, berfungsi sebagai metode yang digunakan oleh pemerintah suatu negara dan dianggap sebagai pendekatan utama dalam menjalankan berbagai fungsi negara. Dengan demikian, administrasi publik mencakup aspek manajerial dan politik. Menurut George J. Gordon (Inu Kencana 2006:25) Administrasi publik didefinisikan sebagai proses menyeluruh yang dilakukan oleh organisasi maupun individu yang berkaitan dengan pemerintah, termasuk pelaksanaan hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh lembaga eksekutif dan yudikatif.

Ilmu administrasi publik memiliki ruang lingkup yang sangat luas, sehingga para ahli seperti Robert Presthus menyatakan bahwa studi administrasi ini lebih komprehensif dibandingkan dengan ilmu sosial lainnya. Dari berbagai pendapat

para ahli mengenai definisi administrasi publik, jika diteliti lebih mendalam, sebenarnya administrasi publik berasal dari dua pola pemikiran yang berbeda. Pola pertama melihat administrasi publik sebagai aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya oleh lembaga eksekutif. Misalnya, M. E. Dimock yang mencatat bahwa W. F. Willoughby menyatakan, “Administrative function is the function of actually administering the law as declared by the legislative and interpreted by the judicial branches of government.” Pernyataan Willoughby menunjukkan bahwa administrasi publik hanya berhubungan dengan fungsi pelaksanaan hukum yang telah ditetapkan oleh DPR, dan juga diartikan bahwa “Public administration as field is mainly concerned with the means for implementing political values” (administrasi publik sebagai satu bidang studi yang berkaitan, terutama dengan sarana-sarana untuk melaksanakan nilai-nilai atau keputusan politik).

Pola kedua, melihat administrasi publik lebih luas dibanding pembahasan mengenai aktivitas-aktivitas lembaga eksekutif. Namun sebaliknya, administrasi publik mencakup seluruh aktivitas dari ketiga cabang pemerintahan, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Semuanya itu berujung pada fungsi untuk memberikan pelayanan publik. Dengan pola kedua ini, J. M. Piffner berpendapat bahwa “Public asministration is the coordination of collective efforts to implement public policy” (administrasi publik adalah koordinasi dari usaha-usaha kolektif yang dimaksudkan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah),” (Dimock, 1964).

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Dalam administrasi publik, terdapat beberapa evolusi paradigma yang mencerminkan perubahan dalam cara pandang terhadap peran pemerintah, interaksi dengan masyarakat, dan pendekatan dalam penyediaan layanan publik:

Paradigma pertama, yaitu pada tahun 1900-1926 dikenal sebagai paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi. Tokoh-tokoh dalam paradigma ini adalah Frank J. Goodnow dan Leonard D. White. Goodnow menyatakan politik harus memusatkan perhatiannya pada kebijakan atau ekspresi dari kehendak rakyat, dan administrasi memberikan perhatian pada pelaksanaan maupun implementasi dari kebijakan atau kehendak tersebut. Pendapat Goodnow ini dituangkan dalam tulisannya pada tahun 1900 yang berjudul “Politics and Administration.” Pada paradigma pertama ini hanya menekankan pada aspek “locus” saja yaitu, government bureaucracy, namun fokus atau metode apa yang harus dikembangkan dalam administrasi publik kurang dibahas secara jelas dan detail.

Paradigma kedua pada tahun 1927-1937, paradigma ini disebut sebagai paradigma prinsip-prinsip administrasi. Willoghby, Gullick dan Urwick serta tokoh-tokoh manajemen klasik yaitu Fayol dan Taylor memperkenalkan bahwa prinsip-prinsip administrasi menjadi fokus utama administrasi publik. Prinsip-prinsip tersebut adalah PODSCORB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting). Prinsip-prinsip tersebut bersifat universal dan dapat diterapkan dimana saja tanpa ada batasan ruang dan waktu. Oleh karena itu pada paradigma ini lebih menekankan pada fokus bukan lokus.

Paradigma ketiga pada tahun 1950-1970. Pada paradigma ini administrasi negara disebut juga sebagai ilmu politik. Dalam konsep paradigma ketiga ini Herbert Simon mengungkapkan bahwa administrasi negara bukan lah value free atau bisa diterapkan dimana saja. Herbert Simon juga mengungkapkan kritiknya terhadap prinsip administrasi yang tidak konsisten dan menilai bahwa prinsip-prinsip tersebut tidak bersifat universal. Kemudian John Gaus mengatakan bahwa teori administrasi publik adalah teori politik. Oleh karena itu muncul paradigma baru yang menganggap administrasi publik sebagai ilmu politik dimana lokusnya merupakan birokrasi pemerintahan namun fokusnya masih tidak jelas karena prinsip-prinsip administrasi publik mengandung banyak kelemahan. Masa paradigma ketiga ini administrasi publik mengalami krisis identitas. Hal tersebut disebabkan karena ilmu politik dianggap paling menonjol dalam dunia administrasi publik.

Paradigma Keempat pada tahun 1956-1970. Paradigma keempat menjelaskan administrasi publik sebagai ilmu administrasi. Paradigma ini prinsip-prinsip manajemen yang pernah digunakan yaitu pada paradigma kedua kemudian dikembangkan secara ilmiah. Fokus dari paradigma ini adalah perilaku organisasi, analisis manajemen, penerapan teknologi modern, seperti metode kualitatif, analisis sistem, riset operasi dan masih banyak lagi. Dalam paradigma ini terjadi dua perkembangan yaitu pertama berorientasi kepada perkembangan ilmu administrasi murni yang didorong oleh disiplin psikologi sosial dan kedua yang berorientasi pada kebijakan publik. Kedua perkembangan tersebut dianggap dapat diterapkan tidak hanya ke dalam dunia bisnis tetapi bisa juga ke dalam administrasi publik. Maka dari itu lokus dalam paradigma ini menjadi tidak jelas.

Paradigma kelima pada tahun 1970-sekarang, paradigma ini menjelaskan bahwa administrasi publik sebagai administrasi publik. Fokus dan lokus pada paradigma ini terlihat jelas. Fokus administrasi publik dalam paradigma ini, yaitu teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik. Lokus dalam paradigma ini adalah masalah-masalah serta kepentingan-kepentingan publik.

Paradigma terakhir, yaitu governance. Paradigma governance merupakan suatu sistem nilai, kebijakan, dan kelembagaan dimana urusan-urusan ekonomi, sosial, dan politik dikelola melalui interaksi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Paradigma governance memprioritaskan mekanisme dan proses dimana para warga masyarakat dan kelompok dapat mengartikulasikan kepentingannya, memediasi berbagai perbedaan-perbedaannya, serta menjalankan hak dan kewajibannya.

Dari beberapa paradigma tersebut, paradigma keenam menganalisis dan mendukung pengembangan komunitas yang berkelanjutan dalam program intervensi berbasis masyarakat oleh BNN Jakarta Timur, sehingga menciptakan dampak positif yang lebih besar dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

1.6.4 Pengembangan Masyarakat

Menurut UNESCO, pengembangan masyarakat (Community Development) didefinisikan sebagai "proses di mana upaya masyarakat sendiri dipadukan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya komunitas dalam kehidupan berbangsa, serta memungkinkan mereka untuk berkontribusi secara penuh terhadap program nasional." Seorang ahli pengembangan masyarakat, Arthur Dunham, merumuskan pengertian community

development sebagai "upaya terorganisir untuk meningkatkan kondisi kehidupan komunitas dan kapasitasnya dalam mengatasi masalah" (Direktori File UPI, 2003). Pengembangan masyarakat juga mencakup integrasi berbagai disiplin ilmu untuk membantu komunitas, dengan penekanan pada swadaya dan partisipasi aktif warga. Menurut Charolinda (2006), secara umum, pengembangan masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan terarah untuk meningkatkan kualitas masyarakat dalam aspek sosial, ekonomi, dan kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan dengan kegiatan pembangunan sebelumnya, yang dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. D. Matarrita-Cascante dan M. A. Brennan (2012) dalam Hadi (2019) menyatakan bahwa terdapat tiga bentuk pelaksanaan pengembangan masyarakat, yaitu imposed, directed, dan self-help.

1. Imposed: Dalam bentuk imposed, pemangku kepentingan utama adalah pemerintah atau penyedia program yang mengendalikan tujuan dan proses tanpa selalu melibatkan anggota masyarakat yang menjadi sasaran. Sebagian besar tujuan dari pendekatan ini berfokus pada perbaikan infrastruktur dan teknologi.
2. Directed: Dalam bentuk directed, kepentingan utamanya biasanya berasal dari pemerintah atau LSM, yang lebih banyak melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Namun, tujuan yang ditetapkan tetap tidak sepenuhnya berasal dari sudut pandang masyarakat. Pendekatan ini berfokus pada perbaikan lingkungan fisik dengan harapan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Self-help: Selanjutnya, dalam bentuk self-help, komunitas sasaran menjadi pemangku kepentingan utama, sehingga masyarakat dilibatkan dalam

semua proses dan penentuan tujuan. Tujuan dari pendekatan self-help adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di dalam komunitas tersebut.

Suatu program pengembangan masyarakat akan lebih berhasil apabila semua pihak memahami falsafah (filosofi) yang mendasarinya. Falsafah secara umum diartikan sebagai pandangan hidup (way of life), dengan demikian falsafah harus dipahami sebagai sumber segala kebijakan, norma, dan peraturan dalam semua aspek kegiatan pengembangan. Beberapa falsafah yang dapat diikuti dalam kegiatan pengembangan masyarakat antara lain:

1. Bekerja Berdasarkan Kebutuhan yang Dirasakan: Dalam pengembangan masyarakat, program yang disusun seharusnya berlandaskan pada kebutuhan yang dirasakan oleh komunitas. Hal ini memastikan bahwa inisiatif yang dilakukan dapat mengatasi masalah atau mencapai tujuan yang diinginkan oleh masyarakat sasaran. Untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi dari masyarakat, penting untuk mengubah kebutuhan yang dirasakan menjadi kebutuhan nyata.
2. Keinginan untuk Terbebas dari Kemiskinan dan Penderitaan: Setiap orang memiliki harapan untuk hidup dalam kondisi yang cukup, memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, dan kebutuhan lainnya. Oleh karena itu, setiap upaya pengembangan masyarakat harus bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup komunitas tersebut. Dengan demikian, semua kegiatan yang dirumuskan harus diarahkan untuk memperbaiki tingkat kehidupan masyarakat sasaran.

3. Keinginan untuk Kebebasan dalam Menentukan Jalan Hidup: Masyarakat menginginkan kebebasan untuk menentukan jalannya sendiri. Dalam pengembangan masyarakat, semua pihak harus mampu menciptakan suasana yang kondusif agar anggota masyarakat dapat dengan bebas memilih kegiatan ekonomi, sosial, politik, dan budaya mereka. Suasana kebebasan ini perlu dikembangkan melalui berbagai forum sosial yang ada di masyarakat. Melalui forum-forum sosial tersebut, diharapkan masyarakat dapat belajar menyelesaikan masalah yang mereka hadapi secara demokratis.

4. Penghargaan terhadap Nilai-nilai Sosial: Agar program pengembangan masyarakat mendapatkan persetujuan dan dukungan dari masyarakat, penting untuk mempertimbangkan nilai-nilai sosial yang dianut, seperti adat dan kepercayaan. Dengan demikian, semua keputusan yang diambil dalam pengembangan masyarakat dapat dipertanggungjawabkan secara sosial.

5. Masyarakat sebagai Sumber Daya yang Potensial: Masyarakat, yang terdiri dari individu-individu, merupakan sumber daya manusia (SDM) yang berpotensi dalam mengelola sumber daya alam (SDA) dan memproduksi sumber daya buatan. Interaksi ketiga sumber daya ini tidak akan memberikan manfaat jika kualitas sumber daya manusia tidak diperhatikan. Dengan kata lain, pemanfaatan sumber daya yang ada untuk pengembangan masyarakat sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia itu sendiri.

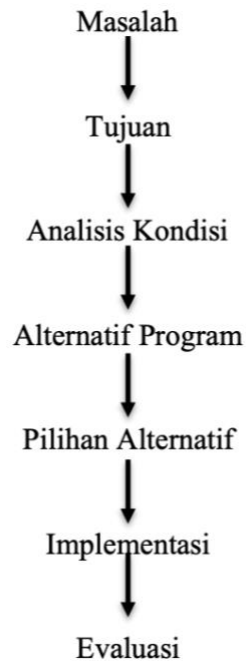
6. Program Pengembangan Masyarakat dan Perubahan Perilaku: Program pengembangan masyarakat mencakup perubahan perilaku yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Perubahan dalam pengetahuan menjadi

dasar bagi terjadinya perubahan lainnya. Peningkatan ketiga aspek ini dapat dicapai melalui upaya pendidikan formal, non-formal, dan informal. Oleh karena itu, kegiatan pengembangan masyarakat sebaiknya tetap mengedepankan prinsip-prinsip pembelajaran bagi masyarakat.

7. Kemampuan Swadaya: Masyarakat harus mampu menolong dirinya sendiri. Penetapan program-program pengembangan masyarakat harus diarahkan untuk mendorong kemandirian masyarakat. Masyarakat perlu mengadopsi pola pikir “bukan apa yang harus dipikirkan, tetapi bagaimana cara berpikir,” seperti yang diungkapkan oleh Raudabough (1960). Dengan demikian, diharapkan setelah agen perubahan meninggalkan proses pengembangan masyarakat, komunitas lokal dapat menjadi lebih mandiri dan tidak lagi tergantung pada pihak luar.

Menurut Rudito dan Famiola (2019), sebagai langkah pertama dalam pelaksanaan pengembangan masyarakat untuk pemberdayaan, sangat penting untuk memahami kebutuhan masyarakat yang bersangkutan. Dengan cara ini, arahan dan dukungan dari masyarakat dapat dijadikan acuan dalam pengembangan program yang akan dilaksanakan. Untuk mengidentifikasi kebutuhan komunitas, dilakukan pemetaan sosial sebagai metode untuk mendalami pola kehidupan masyarakat, sehingga dapat memudahkan dalam menentukan pendekatan yang akan diterapkan.

Gambar 1. 1 Tahapan Perencanaan Pengembangan Komunitas menurut Boothroyd dalam Hadi (2019)



Sumber : S. Hadi, 2019

Proses pengembangan masyarakat yang dipaparkan oleh Hadi (2019b) mencakup serangkaian langkah sistematis, dimulai dari identifikasi masalah, penetapan tujuan, analisis kondisi, perumusan alternatif program, pemilihan program yang layak, implementasi, serta evaluasi. Tahap awal identifikasi masalah dilakukan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat dari berbagai aspek. Analisis kondisi dilakukan untuk memahami secara menyeluruh situasi dan sumber daya yang ada di masyarakat. Berdasarkan hasil identifikasi, penetapan tujuan, dan analisis kondisi, berbagai alternatif program dirumuskan dan dipilih yang paling feasible untuk diimplementasikan. Implementasi dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terkait, diikuti dengan

evaluasi secara berkala untuk menilai keberhasilan dan dampak dari program yang telah dijalankan.

Teori Pengembangan Masyarakat, yang banyak dipopulerkan oleh tokoh seperti Julian Rappaport(1981) dan Robert Putnam(2000). Teori ini menekankan pentingnya memberdayakan individu dan komunitas untuk mengontrol kehidupan mereka, mengidentifikasi potensi yang dimiliki, dan menciptakan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Dalam konteks ini, kita akan membahas tiga komponen utama:

1. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah proses yang memungkinkan individu dan kelompok untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk mengambil kontrol atas kehidupan mereka. Dalam konteks teori pemberdayaan, beberapa aspek penting menjadi fokus utama, salah satunya adalah kesadaran diri dan pendidikan. Pemberdayaan dimulai dengan meningkatkan kesadaran individu tentang hak-hak dan potensi yang dimiliki. Pendidikan berperan kunci dalam proses ini, karena memberikan landasan bagi masyarakat untuk memahami situasi yang mereka hadapi dan bagaimana mereka dapat berkontribusi untuk perbaikan.

Program-program yang dirancang untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat, seperti pelatihan keterampilan atau workshop pendidikan, sangat membantu dalam menciptakan pemahaman yang lebih baik. Melalui pelatihan ini, individu atau kelompok tidak hanya belajar tentang isu-isu yang mempengaruhi kehidupan mereka, tetapi juga bagaimana cara mengatasinya.

Dengan pendidikan yang tepat, masyarakat dapat diaktifkan untuk tidak hanya mengenali masalah, tetapi juga mencari solusi yang efektif.

Pada kenyataannya, pemberdayaan yang dilakukan oleh BNN Jakarta Timur mencakup berbagai kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Salah satu kegiatan utama adalah sosialisasi, di mana BNN mengedukasi masyarakat tentang bahaya narkoba dan pentingnya peran aktif mereka dalam menjaga lingkungan dari ancaman penyalahgunaan. Melalui sosialisasi ini, BNN tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membangun hubungan yang lebih kuat dengan masyarakat, sehingga mereka merasa terlibat dan memiliki tanggung jawab terhadap kesehatan komunitas mereka. Sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai cara, seperti kampanye di media sosial, pertemuan komunitas, dan kegiatan edukatif.

2. Penguatan Jaringan

Penguatan jaringan adalah proses yang bertujuan untuk menciptakan dan memperkuat hubungan antaranggota komunitas, serta antara komunitas dengan pihak luar. Dalam konteks ini, penguatan jaringan memiliki beberapa komponen penting yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Salah satu aspek utama dari penguatan jaringan adalah solidaritas dan dukungan sosial. Jaringan sosial yang kuat dapat memberikan dukungan emosional dan praktis kepada anggota komunitas. Ketika individu merasa terhubung dengan orang lain, mereka cenderung lebih bersedia untuk saling membantu dalam menghadapi tantangan. Julian Rappaport menekankan bahwa dukungan sosial

merupakan salah satu aset penting yang perlu dikembangkan dalam komunitas. Dengan adanya dukungan ini, individu dapat merasa lebih aman dan termotivasi untuk berkontribusi, baik secara individu maupun kolektif.

Dalam meningkatkan penguatan jaringan, BNN Jakarta Timur membentuk Agen Pemulihan (AP) sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat solidaritas dan dukungan sosial di masyarakat. Pembentukan AP ini bertujuan untuk menciptakan kelompok-kelompok yang dapat berfungsi sebagai penggerak dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan mereka. Salah satu aspek utama dari penguatan jaringan adalah solidaritas, di mana jaringan sosial yang kuat dapat memberikan dukungan emosional dan praktis kepada anggota komunitas. Ketika individu merasa terhubung dengan orang lain, mereka cenderung lebih bersedia untuk saling membantu dalam menghadapi tantangan. Hal ini sejalan dengan pandangan Julian Rappaport yang menekankan bahwa dukungan sosial merupakan salah satu aset penting yang perlu dikembangkan dalam komunitas.

Agen Pemulihan berperan sebagai jembatan antara BNN dan masyarakat, membantu menyebarkan informasi tentang bahaya narkoba serta layanan rehabilitasi yang tersedia. Dengan adanya AP, BNN berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu penyalahgunaan narkoba dan mendorong partisipasi aktif dalam upaya pencegahan. Selain itu, keberadaan AP juga memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab di antara anggota komunitas, sehingga mereka lebih termotivasi untuk berkontribusi secara individu maupun kolektif. Melalui pelatihan dan pendampingan, anggota AP dilatih untuk menjadi

fasilitator dalam komunitas mereka, membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan responsif terhadap masalah narkoba.

Dengan membentuk jaringan yang solid melalui Agen Pemulihan, BNN Jakarta Timur tidak hanya berfokus pada pencegahan penyalahgunaan narkoba tetapi juga pada pembangunan kapasitas masyarakat. Dukungan sosial yang terjalin dalam jaringan ini diharapkan dapat menciptakan rasa aman di antara individu, sehingga mereka merasa didukung untuk mengambil langkah-langkah positif dalam kehidupan mereka. Melalui kolaborasi dan solidaritas ini, BNN Jakarta Timur berupaya mewujudkan masyarakat yang lebih tangguh dan mampu melawan ancaman penyalahgunaan narkoba secara bersama-sama. Dengan demikian, program ini tidak hanya memberikan manfaat langsung dalam pencegahan narkoba tetapi juga memperkuat ikatan sosial di dalam komunitas.

BNN Jakarta Timur juga melakukan pemetaan untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah yang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba serta potensi sumber daya yang ada di masyarakat. Hal ini memungkinkan BNN untuk merancang program yang lebih tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan lokal. Pemetaan ini tidak hanya membantu dalam identifikasi geografis, tetapi juga memahami dinamika sosial dan ekonomi masyarakat yang dapat mempengaruhi perilaku terkait narkoba. Dengan demikian, BNN dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba di setiap wilayah.

3. Keberlanjutan

Keberlanjutan merujuk pada kemampuan program dan inisiatif untuk terus berlanjut dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Dalam konteks pengembangan masyarakat, beberapa elemen penting dari keberlanjutan perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa program yang telah dibangun dapat bertahan dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan.

Salah satu elemen kunci dari keberlanjutan adalah peningkatan kapasitas. Masyarakat yang diberdayakan dan memiliki kapasitas yang kuat cenderung lebih mampu menghadapi tantangan serta mempertahankan program yang telah mereka bangun. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan dan pengetahuan harus menjadi bagian integral dari setiap inisiatif. Robert Putnam, dalam teorinya tentang modal sosial (social capital), menekankan pentingnya jaringan sosial yang kuat dalam mendukung keberlanjutan. Jaringan yang solid memungkinkan individu untuk saling mendukung, berbagi sumber daya, dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama, sehingga meningkatkan daya tahan komunitas.

Selain peningkatan kapasitas, monitoring dan evaluasi juga merupakan komponen penting untuk memastikan keberlanjutan. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala membantu dalam mengidentifikasi masalah dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan program. Proses ini memberikan kesempatan untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan, sehingga program tetap relevan dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan pemantauan yang tepat, komunitas dapat mengambil tindakan proaktif untuk

mengatasi isu-isu yang muncul, memastikan bahwa manfaat dari program terus dirasakan oleh anggota masyarakat.

Dalam upaya menjaga keberlanjutan program pengembangan komunitas, BNN Jakarta Timur melakukan berbagai kegiatan yang berfokus pada peningkatan kapasitas masyarakat dan penguatan jaringan sosial. Salah satu elemen kunci dari keberlanjutan adalah peningkatan kapasitas. Masyarakat yang diberdayakan dan memiliki kapasitas yang kuat cenderung lebih mampu menghadapi tantangan serta mempertahankan program yang telah mereka bangun. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan dan pengetahuan menjadi bagian integral dari setiap inisiatif yang dilakukan oleh BNN Jakarta Timur dalam program IBM. Melalui pelatihan dan pendampingan, anggota masyarakat dibekali dengan kemampuan yang dibutuhkan untuk berperan aktif dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan mereka.

Selain peningkatan kapasitas, kegiatan penjangkauan juga menjadi bagian integral dari strategi pemberdayaan BNN Jakarta Timur. Penjangkauan bertujuan untuk menjangkau individu atau kelompok yang mungkin belum terlibat dalam program-program pencegahan atau yang berada dalam situasi berisiko tinggi. Melalui pendekatan ini, BNN dapat memberikan dukungan langsung kepada mereka yang membutuhkan, termasuk akses ke layanan rehabilitasi dan konseling. Kegiatan penjangkauan ini tidak hanya membantu mengurangi stigma terhadap pengguna narkoba, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih inklusif di mana semua anggota masyarakat dapat berkontribusi dalam upaya pencegahan. Dengan melaksanakan berbagai kegiatan ini secara konsisten, BNN Jakarta Timur berupaya

membangun komunitas yang lebih sadar dan tanggap terhadap isu penyalahgunaan narkoba.

Tabel 1. 6 Perbandingan Teori Pengembangan Komunitas dengan Pengembangan Komunitas dalam Program IBM oleh BNN Jakarta Timur

Aspek	Julian Rappaport (1981) & Robert Putnam (2000)	Pengembangan Komunitas oleh BNN dalam Program IBM	Sintesis
Fokus Utama	Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan kapasitas dan modal sosial sebagai kunci keberhasilan	Pemberdayaan masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba melalui partisipasi aktif dan kolaborasi.	BNN mengadopsi pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan modal sosial yang ada untuk mencapai tujuan pencegahan narkoba.
Pemberdayaan	Pemberdayaan masyarakat sebagai agen perubahan yang aktif melalui pengembangan kapasitas dan modal sosial.	BNN memberdayakan masyarakat melalui pelatihan dan melakukan identifikasi kebutuhan apa saja sesuai dengan lingkungannya.	Pemberdayaan individu dan kelompok melalui pelatihan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi tantangan penyalahgunaan narkoba.
Penguatan Jaringan	Jaringan sosial yang kuat meningkatkan solidaritas dan kolaborasi antar anggota komunitas.	BNN membangun jaringan sosial melalui kolaborasi dengan tokoh masyarakat, lembaga, dan kelompok pemuda dengan membentuk Agen Pemulihan (AP) dalam program IBM.	Penguatan jaringan sosial memungkinkan kolaborasi yang lebih baik dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, menciptakan dukungan

			emosional dan praktis.
Keberlanjutan	Keberlanjutan program bergantung pada pemberdayaan komunitas dan dukungan jaringan sosial yang solid.	Program IBM dirancang untuk berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pencegahan dan rehabilitasi.	Keberlanjutan program dapat dicapai dengan memberdayakan masyarakat dan membangun jaringan sosial yang kuat, sehingga program tetap relevan dan efektif.

Sumber: Dikutip dari berbagai sumber yang diolah (2024)

1.6.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Masyarakat

Salah satu yang menjelaskan factor-faktor yang mempengaruhi pengembangan komunitas adalah Teori Asset-Based Community Development (ABCD). Teori Asset-Based Community Development (ABCD) berfokus pada mengidentifikasi dan memanfaatkan aset serta potensi yang dimiliki oleh komunitas itu sendiri, seperti sumber daya alam, keterampilan individu, kelompok, dan jaringan sosial yang ada di dalam masyarakat (Kretzmann & McKnight, 1993). Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan tradisional yang berfokus pada masalah dan kekurangan masyarakat, karena ABCD meyakini bahwa setiap komunitas memiliki aset dan potensi yang dapat dioptimalkan untuk pengembangan yang berkelanjutan. Keterlibatan aktif dan partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan dalam pengembangan berbasis aset ini, di mana masyarakat dilibatkan secara penuh dalam setiap tahapan proses, didukung oleh kepemimpinan lokal yang dapat menjadi penggerak dan motivator (Mathie & Cunningham, 2003).

Pengembangan jaringan dan kemitraan dengan berbagai pihak serta pemanfaatan teknologi yang sesuai dapat memperkuat kapasitas dan sumber daya yang tersedia bagi komunitas, sehingga memastikan keberlanjutan program pengembangan masyarakat (Kretzmann & McKnight, 1993; Mathie & Cunningham, 2003). Berdasarkan teori Asset-Based Community Development (ABCD), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan masyarakat, yaitu:

1. Aset dan Potensi Komunitas

Faktor utama dalam pendekatan ABCD adalah mengidentifikasi dan memanfaatkan aset serta potensi yang dimiliki oleh komunitas itu sendiri (Kretzmann & McKnight, 1993). Aset dalam konteks ini dapat berupa sumber daya alam, keterampilan individu, kelompok, dan jaringan sosial yang ada di dalam masyarakat. Masyarakat dipandang sebagai pemilik dan pengelola aset-aset tersebut, sehingga keterlibatan aktif dan partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam proses pengembangan berbasis aset ini. Pendekatan ABCD memiliki keyakinan bahwa setiap komunitas memiliki potensi yang dapat dioptimalkan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, berbeda dengan pendekatan tradisional yang cenderung berfokus pada masalah dan kekurangan masyarakat (Kretzmann & McKnight, 1993; Mathie & Cunningham, 2003).

2. Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan aktif dan partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan dalam pengembangan masyarakat berbasis aset (Mathie & Cunningham, 2003). Teori ABCD menekankan perlunya masyarakat dilibatkan secara penuh dalam setiap tahapan proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi

program pengembangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses dan hasil pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Kretzmann & McKnight, 1993). Partisipasi masyarakat yang luas juga dapat mendorong rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama, sehingga meningkatkan keberlanjutan program pengembangan. Pendekatan ABCD meyakini bahwa masyarakat adalah aktor utama dalam proses pembangunan, bukan hanya sebagai penerima manfaat pasif. Oleh karena itu, kepemimpinan lokal dan penggerak masyarakat menjadi elemen penting yang harus diidentifikasi dan didukung untuk memastikan partisipasi aktif masyarakat sepanjang proses pengembangan (Mathie & Cunningham, 2003).

3. Kepemimpinan

Keberadaan pemimpin lokal yang dapat menjadi penggerak, motivator, dan fasilitator bagi masyarakat sangat penting dalam mendorong partisipasi dan keberlanjutan program pengembangan masyarakat (Kretzmann & McKnight, 1993). Teori Asset-Based Community Development (ABCD) menekankan peran vital pemimpin dalam memobilisasi sumber daya dan menggerakkan komunitas untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan. Pemimpin lokal yang diakui dan dihormati oleh masyarakat dapat berperan sebagai penghubung antara komunitas dengan pemangku kepentingan lainnya, serta mendorong partisipasi aktif warga dalam setiap tahapan pengembangan (Mathie & Cunningham, 2003). Mereka juga dapat menjadi teladan dan inspirasi bagi masyarakat, memotivasi warga untuk memanfaatkan aset-aset yang dimiliki, dan memfasilitasi dialog serta pengambilan keputusan bersama. Pendekatan ABCD meyakini bahwa kepemimpinan lokal yang

kuat dan partisipatif merupakan kunci untuk memastikan keberlanjutan proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Kretzmann & McKnight, 1993).

4. Jaringan dan Kemitraan

Pengembangan jaringan dan kemitraan dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, swasta, dan organisasi lainnya, dapat memperkuat kapasitas dan sumber daya yang tersedia bagi komunitas (Mathie & Cunningham, 2003). Teori Asset-Based Community Development (ABCD) mendorong komunitas untuk membangun kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan akses terhadap sumber daya dan dukungan eksternal yang diperlukan. Melalui kemitraan yang efektif, masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, finansial, maupun jaringan yang dapat memperkuat upaya pengembangan lokal (Kretzmann & McKnight, 1993). Pemimpin lokal yang terhubung dengan berbagai pihak dapat berperan sebagai penghubung dan fasilitator, menggerakkan dukungan eksternal untuk mendukung inisiatif dan prioritas yang diidentifikasi oleh komunitas. Pendekatan ABCD menekankan pentingnya membangun kepercayaan dan saling menguntungkan dalam relasi kemitraan, sehingga dapat mendorong keberlanjutan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (Mathie & Cunningham, 2003)

5. Pemanfaatan Teknologi

Teori Asset-Based Community Development (ABCD) mengakui peran penting teknologi dalam mendukung efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan program pengembangan masyarakat (Kretzmann & McKnight, 1993). Pemanfaatan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dapat meningkatkan produktivitas, transparansi, dan akses informasi bagi komunitas.

Misalnya, penggunaan teknologi digital dapat membantu komunitas dalam melakukan dokumentasi, berbagi pengetahuan, dan memantau kemajuan program secara lebih efektif (Mathie & Cunningham, 2003). Selain itu, teknologi juga dapat memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara masyarakat lokal dengan pemangku kepentingan lainnya, seperti pemerintah, swasta, dan organisasi pembangunan. Dengan demikian, teknologi dapat menjadi alat yang mendukung proses pemberdayaan masyarakat dan memperkuat inisiatif pembangunan yang berpusat pada komunitas. Namun, penerapan teknologi harus dilakukan dengan memperhatikan konteks lokal, sumber daya yang tersedia, dan kebutuhan nyata masyarakat, agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan (Kretzmann & McKnight, 1993)

1.7 Kerangka Pemikiran Teoritis

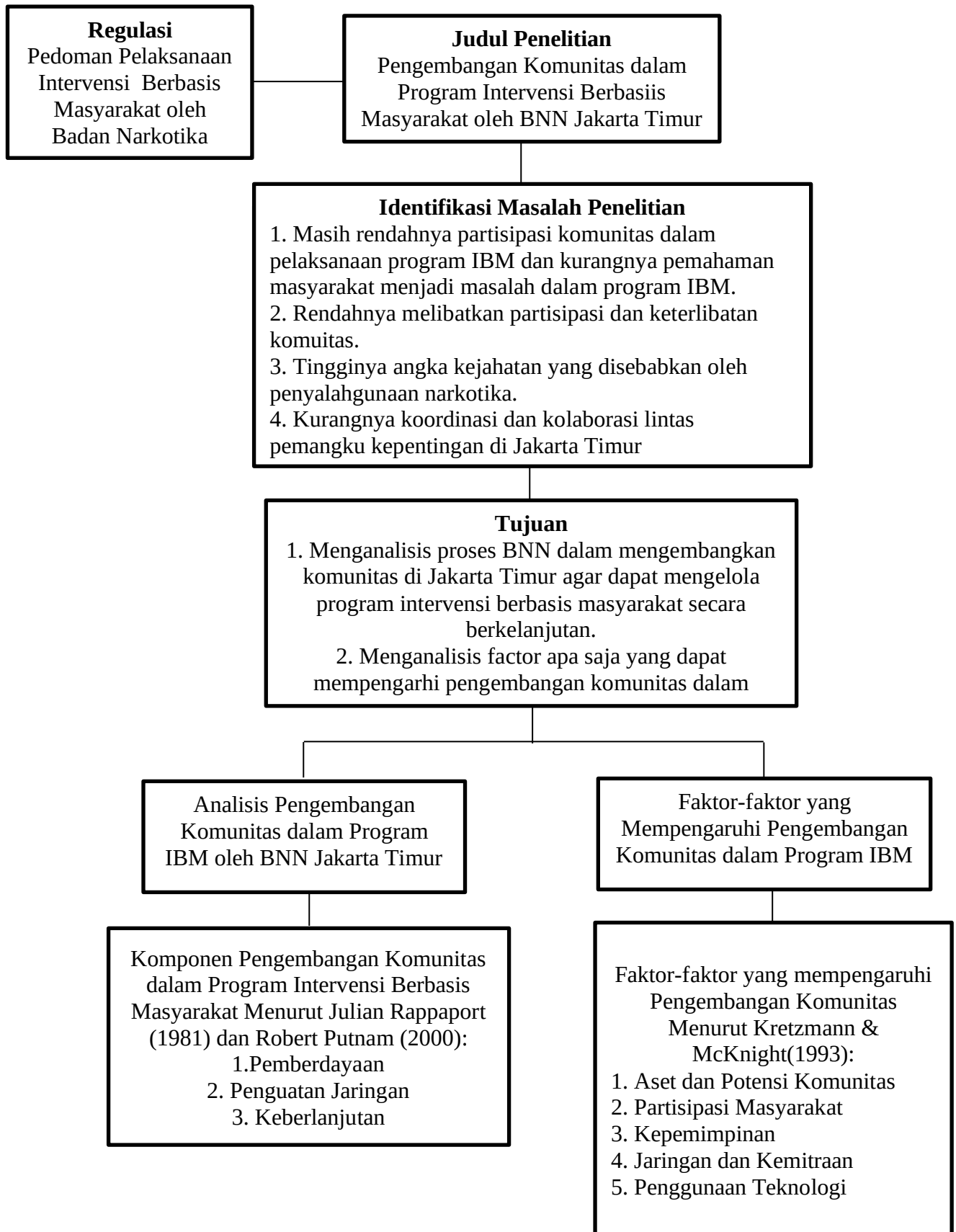
Dasar pengembangan komunitas dalam program intervensi berbasis masyarakat oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Jakarta Timur tercantum dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Intervensi Berbasis Masyarakat oleh BNN. Peneliti mendeskripsikan dan menganalisis pengembangan komunitas tersebut dengan melihat kondisi di lapangan dan menggunakan teori pengembangan komunitas menurut Julian Rappaport (1981) dan Robert Putnam (2000), yang terdiri dari tiga komponen, yaitu pemberdayaan, penguatan jaringan, dan keberlanjutan. Selain itu, peneliti juga menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan komunitas menurut Mathie & Cunningham (2003), yang meliputi aset dan potensi komunitas, partisipasi masyarakat, kepemimpinan, jaringan dan kemitraan, serta penggunaan teknologi.

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah didefinisikan, terdapat beberapa masalah dalam pengembangan komunitas dalam program intervensi berbasis masyarakat yang dilakukan oleh BNN Jakarta Timur, antara lain: masih

rendahnya partisipasi komunitas dalam pelaksanaan program IBM, kurangnya pemahaman masyarakat, rendahnya keterlibatan komunitas, tingginya angka kejahatan yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba, serta kurangnya koordinasi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan di Jakarta Timur.

Tujuan dari penelitian dengan judul "Pengembangan Komunitas dalam Program Intervensi Berbasis Masyarakat oleh BNN Jakarta Timur" adalah menganalisis proses BNN dalam mengembangkan komunitas di Jakarta Timur agar dapat mengelola program intervensi berbasis masyarakat secara berkelanjutan. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pengembangan komunitas dalam program intervensi berbasis masyarakat.

Bagan 1.1 Kerangka Berpikir Teoritis



1.8 Operasionalisasi Konsep

Penelitian ini akan mengkaji konsep pengembangan komunitas dalam program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang dilaksanakan oleh BNN Jakarta Timur. Pengembangan komunitas merujuk pada kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan terarah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dengan fokus pada aspek sosial, ekonomi, dan standar hidup secara keseluruhan yang lebih baik dibandingkan dengan upaya pembangunan sebelumnya. Kegiatan ini dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan, dengan melibatkan partisipasi aktif dari anggota komunitas.

Di BNN Jakarta Timur, pengembangan komunitas dalam program IBM melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk anggota masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan lembaga pemerintah lainnya. Tujuan dari keterlibatan ini adalah untuk meningkatkan keberhasilan program intervensi, dengan mengedepankan pendekatan kolaboratif yang memungkinkan masyarakat berperan sebagai agen perubahan.

Merujuk pada pemikiran Julian Rappaport (1981) dan Robert Putnam (2000), terdapat beberapa komponen penting dalam pengembangan komunitas yang perlu diperhatikan. BNN Jakarta Timur menerapkan tiga komponen utama dalam program IBM, yaitu:

- Pemberdayaan: Suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu dan kelompok dalam komunitas untuk mengontrol dan memperbaiki kondisi kehidupan mereka.
- Penguatan Jaringan: Upaya untuk membangun dan memperkuat hubungan sosial serta kolaborasi antara individu, kelompok, organisasi, dan lembaga

dalam masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sinergi yang dapat mendukung pelaksanaan program IBM.

- Keberlanjutan: kemampuan program dan inisiatif yang dilaksanakan untuk terus beroperasi dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat setelah intervensi awal selesai. Konsep ini menekankan pentingnya menciptakan dampak yang berkelanjutan dalam komunitas, bukan hanya pada keberlanjutan program itu sendiri.

Keberhasilan pengembangan komunitas yang dilakukan oleh BNN Jakarta Timur dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Kretzmann & McKnight (1993) dan Mathie & Cunningham (2003), teori Asset-Based Community Development (ABCD) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan komunitas, di antaranya:

- Aset dan Potensi Komunitas: Mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam komunitas, seperti keterampilan, pengetahuan, dan jaringan sosial.
- Partisipasi Masyarakat: Mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap program, dari perencanaan hingga evaluasi, sehingga meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap program.
- Kepemimpinan: Memastikan ada pemimpin atau fasilitator yang mampu menggerakkan komunitas dan mendorong partisipasi aktif.
- Jaringan dan Kemitraan: Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperkuat dukungan terhadap program.

- Penggunaan Teknologi: Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan komunikasi, pelatihan, dan akses terhadap informasi yang relevan bagi masyarakat.

Melalui penerapan teori ABCD dan perhatian pada faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan komunitas, BNN Jakarta Timur dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam komunitas sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan demikian, program IBM diharapkan dapat memberikan dampak positif dan berkelanjutan dalam penanganan masalah narkoba di wilayah tersebut.

1.9 Fenomena Penelitian

Pada penelitian mengenai Pengembangan Komunitas dalam Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) oleh BNN Jakarta Timur ini dilatarbelakangi oleh rendahnya partisipasi komunitas dalam pelaksanaan program IBM yang dilaksanakan oleh BNN Jakarta Timur sehingga mengakibatkan semakin tingginya tingkat narkoba yang ada di Jakarta Timur dan tidak optimalnya keberjalanan program IBM itu sendiri. Oleh karena itu, terdapat dua rumusan masalah, yaitu bagaimana BNN Jakarta timur mengembangkan komunitas dalam program IBM dan faktor yang mempengaruhi pengembangan komunitas dalam program IBM. Penulis berargumen bahwa masalah tersebut terjadi disebabkan oleh kurangnya partisipasi komunitas sehingga dalam pelaksanaan program IBM itu sendiri masih kurang optimal dalam keberlangsungannya.

Berbagai fenomena tersebut menarik perhatian peneliti untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengembangan komunitas dalam program IBM

yang dilaksanakan oleh BNN Jakarta Timur, sekaligus factor-faktor yang mempengaruhi pengembangan komunitas. Peneliti berasumsi bahwa penelitian ini bersifat baru karena belum ada referensi penelitian lain yang membahas mengenai focus dan lokus tersebut. Berikut uraian lengkap fenomena yang diamati dalam penelitian ini:

Tabel 1. 7 Operasionalisasi Konsep

Fenomena	Sub Fenomena	Gejala yang diamati di Lapangan
Pengembangan Komunitas	Pemberdayaan	1. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Komunitas dalam Mencegah Peredaran Narkotika. 2. Upaya Komunitas dalam Mengontrol dan Memperbaiki Komunitas.
	Penguatan Jaringan	1. Pembentukan Kelompok Relawan sebagai Agen Pemulihan untuk Memperkuat Jaringan Sosial. 2. Memperkuat Hubungan Sosial dan Jaringan untuk Meningkatkan Peran Agen Pemulihan. 3. Kolaborasi Agen Pemulihan dengan BNN Jakarta Timur dalam Membangun Komunitas yang Kuat.
	Keberlanjutan	1. Bentuk-Bentuk Kegiatan untuk Menjamin Keberlanjutan Operasional Program IBM. 2. Strategi BNN Jakarta Timur dalam Program IBM untuk Menjamin Keberlanjutan Operasional.
Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Komunitas	Aset dan Potensi Komunitas	1. Adanya Keterampilan, Pengetahuan, dan Sumber Daya dalam Komunitas yang Dapat Dimanfaatkan. 2. Adanya Fasilitas Fisik dan Sosial di Komunitas dan dapat dimanfaatkan dalam Program IBM.

	Partisipasi Masyarakat	1. Adanya Keterlibatan Aktif Komunitas dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Program. 2. Adanya Pelaksanaan Program oleh Kelompok Berdasarkan Kebutuhan dan Kondisi.
	Kepemimpinan	1. Adanya Peran Tokoh Masyarakat dalam Mempengaruhi, Mengarahkan dan Memotivasi Anggota Komunitas. 2. Adanya Kemampuan Ketua dalam Memimpin.
	Jaringan dan Kemitraan	1. Adanya Kerja Sama antara BNN dan Pihak Lain dalam Pelaksanaan Program. 2. Adanya Individu yang Mampu Memobilisasi Masyarakat.
	Penggunaan Teknologi	1. Adanya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Mendukung Program IBM. 2. Adanya Pemanfaatan Media Sosial dalam Penyebaran Informasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika

Sumber: Dikutip dari berbagai sumber yang diolah (2024)

1.10 Metode Penelitian

1.10.1 Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif berfokus pada masalah berdasarkan bukti faktual yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin menganalisis masalah secara mendalam untuk mengumpulkan informasi mengenai Analisis Pengembangan Komunitas oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait dengan Program Intervensi Berbasis Masyarakat di Jakarta Timur. Dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, peneliti akan menghasilkan data yang disampaikan melalui deskripsi tertulis atau lisan berdasarkan pengamatan terhadap subjek atau perilaku mereka.

1.10.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merujuk pada lokasi di mana penelitian dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan data yang akurat dari subjek yang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di Jakarta Timur, khususnya di Badan Narkotika Nasional (BNN) Jakarta Timur, yang beralamat di Kantor Walikota Jakarta Timur, Gedung B2, Lantai 4, RT.11/RW.8, Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur. BNN Jakarta Timur dipilih sebagai area penelitian karena merupakan organisasi publik yang memiliki peran penting dan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan komunitas dalam Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) serta dampaknya terhadap pengguna narkoba. Namun, data

menunjukkan bahwa pemberdayaan komunitas belum sepenuhnya optimal, karena masih terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaannya.

1.10.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian, yang juga dikenal sebagai informan penelitian, adalah individu atau kelompok yang dapat memberikan informasi terkait dengan topik yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk menentukan informan adalah purposive sampling, yaitu teknik pemilihan informan berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu. Berdasarkan hal ini, peneliti menentukan individu yang berpotensi memberikan informasi mengenai Analisis Pengembangan Komunitas oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait dengan Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Jakarta Timur, yaitu :

Tabel 1. 8 Keterangan Informan

Informan	Keterangan	Alasan Pemilihan Informan	Jumlah Informan
I	Kepala Bagian Rehabilitasi BNN Kota Jakarta Timur	Kepala Bagian Rehabilitasi memiliki peran sentral dalam mengkoordinasikan dan membina keterlibatan komunitas dalam program IBM di Jakarta Timur.	1orang

II	Staff Bagian Rehabilitasi BNN Kota Jakarta Timur	Para staff Rehabilitasi BNN Kota Jakarta Timur terlibat secara langsung dalam peran komunitas terhadap program IBM	1orang
III dan IV	Agen Pemulihan BNN	Informan yang dipilih biasanya memiliki pengalaman langsung dalam proses pemulihan, baik sebagai agen pemulihan atau sebagai individu yang mengalami proses tersebut. Ini memberikan wawasan mendalam yang tidak dapat diperoleh dari sumber lain.	2orang
V	Ketua Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)	Kepala komunitas biasanya memiliki pengetahuan yang luas dan pemahaman yang mendalam tentang struktur, dinamika, dan aset-aset yang dimiliki oleh komunitasnya. Mereka sering kali menjadi pemegang informasi penting mengenai sejarah, budaya, dan sumber daya masyarakat.	1orang

VI dan VII	Masyarakat yang terlibat dalam program	Memilih informan yang dapat mewakili berbagai komponen dan kelompok masyarakat yang terlibat dalam program IBM, seperti anggota organisasi masyarakat, warga penerima manfaat, tokoh masyarakat, dan relawan. Hal ini untuk memperoleh gambaran yang komprehensif.	2orang
------------	--	--	--------

1.10.4 Jenis Data

1. Jenis data berupa hasil wawancara dengan informan di bidang Rehabilitasi BNN Kota Jakarta Timur, foto pendukung terkait pelaksanaan rehabilitasi berbasis masyarakat, dan studi dokumen berasal dari Renstra BNN, Lapkin Deputi Rehabilitasi BNN, LAKIP BNN Kota Jakarta Timur, Pedoman Pelaksanaan Intervensi Berbasis Masyarakat dan situs web BNN Kota Jakarta Timur, situs web jakarta open data, dan situs web badan pusat statistik. .
2. Saat melakukan wawancara maupun observasi peneliti akan mencatat data yang didapatkan. Dalam melakukan penelitian, peneliti melihat kondisi bagaimana pengembangan komunitas yang dilakukan oleh BNN terhadap program IBM.

3. Foto, merupakan data yang diambil ketika peneliti melakukan observasi. Hal ini dilakukan untuk mendukung hasil dari wawancara dan pengamatan dengan informan.
4. Sumber tertulis dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, artikel serta dokumen pendukung seperti Renstra BNN, Lapkin Deputi Bidang Rehabilitasi BNN, LAKIP BNN Kota Jakarta Timur, Pedoman Pelaksanaan Intervensi Berbasis Masyarakat dan situs web BNN Kota Jakarta Timur, situs web jakarta open data, dan situs web badan pusat statistik.

1.10.5 Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, sumber data mengacu pada setiap pernyataan dan tindakan yang diperkuat dengan penelaahan referensi lainnya. Oleh karena itu, sumber data dibagi menjadi dua kategori:

1. Data Primer

Data primer adalah informasi pokok yang diperoleh langsung oleh peneliti, seperti pernyataan yang disampaikan oleh informan dalam sesi wawancara atau data yang dikumpulkan melalui observasi. Dalam penelitian ini, sumber data primer mencakup:

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang mendukung data primer tetapi diperoleh secara tidak langsung. Umumnya, data sekunder diperoleh dengan menelaah berbagai referensi, catatan, dokumen, dan bahan sejenis lainnya. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari artikel, jurnal, buku, dan dokumen pendukung lainnya seperti Renstra BNN, laporan Deputi Bidang Rehabilitasi, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) BNN Kota Jakarta Timur.

1.10.6 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, sedangkan instrumen pengumpulan data adalah alat yang dipilih dan digunakan oleh peneliti untuk mempermudah dan mengefisienkan proses pengumpulan data. Metode pengumpulan data menunjukkan cara-cara yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara: (1) observasi, (2) wawancara, dan (3) dokumentasi, sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan langsung yang melibatkan peneliti untuk mengamati dan mencatat seluruh fenomena yang terjadi di lapangan. Peneliti mengamati BNN Jakarta Timur dan komunitas di sekitarnya untuk mendapatkan informasi terkait aktivitas yang dilakukan dalam rangka Analisis Pengembangan Komunitas dalam Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) oleh BNN Jakarta Timur.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data melalui sesi tanya jawab antara peneliti dan informan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara terbuka, di mana informan diberi tahu mengenai tujuan kegiatan wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan meningkatkan keakuratan serta kebenaran data yang dikumpulkan dari dokumen yang ada di lapangan, serta sebagai bahan dalam memverifikasi keabsahan data. Analisis dokumentasi

dilakukan untuk mengumpulkan data dari arsip dan dokumen yang relevan dengan penelitian ini, baik yang ada di lokasi penelitian maupun di luar lokasi. Metode ini berfungsi sebagai pelengkap bagi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan komunitas dan pihak BNN Jakarta Timur.

4. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode untuk mengumpulkan informasi dengan menelaah referensi yang ada. Penelitian ini mengumpulkan informasi melalui studi kepustakaan yang mencakup buku, artikel, literatur, dan catatan yang berkaitan dengan program pemberdayaan komunitas.

1.10.7 Analisis Data Dan Interpretasi Data

Penelitian ini mengadopsi model analisis interaktif, yang menurut Sugiyono (2003, 2010: 97) terdiri dari tiga komponen:

a. Reduksi Data

Reduksi data mengacu pada proses penguraian data yang telah diperoleh dari lapangan dengan merincikan seluruh fenomena yang teramati. Fokusnya adalah pada penguraian hanya untuk poin-poin penting, yang dilakukan secara terus menerus selama durasi penelitian. Setelah data direduksi, seluruh informasi akan diringkas, ditelaah, dan dikategorikan ke dalam beberapa kelompok.

b. Penyajian Data

Penyajian data didefinisikan sebagai kumpulan informasi yang menggambarkan fenomena terkait Pengembangan Komunitas oleh BNN secara rinci, sehingga peneliti dapat memberikan kesimpulan dan memutuskan tindakan yang tepat.

c. Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan dari data penelitian harus dilakukan dari awal hingga akhir penelitian. Proses ini melibatkan penelaahan pola, tema, dan hubungan antar variabel untuk mencapai kesimpulan akhir yang relevan. Sebuah kesimpulan bersifat tentatif, karena kemungkinan adanya perubahan selama proses penelitian.

1.10.8 Kualitas Data

Sugiyono (2006:299) memaparkan standar dari kevalidan sebuah data didefinisikan sebagai keabsahan data, kevalidan data penelitian akan menunjukkan seberapa besar data akan menunjukkan nilai kebenaran. Dalam mengetahui kualitas data, maka dilakukan triangulasi data. Triangulasi merupakan metodologi yang digunakan untuk meningkatkan validitas dan realibilitas suatu penelitian dengan cara menggabungkan data dari berbagai sumber, metode, ataupun teori. Pada penelitian ini, penulis memilih validitas data dengan pendekatan triangulasi agar dapat menganalisis bagaimana kondisi yang terjadi dalam meneliti Analisis Pengembangan Komunitas dalam Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) oleh BNN Jakarta Timur.

Dalam menguji kredibilitas penelitian ini, peneliti mengumpulkan serta menguji data yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada. Kemudian data tersebut ditranskrip secara verbatim, dideskripsikan, dikelompokkan, dan dianalisis sesuai dengan sumber-sumber yang ada. Peneliti melakukan triangulasi sumber sebagai berikut:

1. Peneliti membandingkan hasil dari wawancara dari Kepala Bagian Rehabilitasi BNN Kota Jakarta Timur, Staff Bagian Rehabilitasi BNN Kota

Jakarta Timur , Agen Pemulihan, Kepala Komunitas, dan Masyarakat yang terlibat dalam program.

2. Peneliti melakukan perbandingan antara hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan dengan Analisis Pengembangan Komunitas dalam Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) oleh BNN Jakarta Timur.